LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKIP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA CIMAHI TAHUN 2021

dpmptsp Cimahi

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi Tahun 2021 dapat terselesaikan. LKIP DPMPTSP Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dibuat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja dan memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dilakukan DPMPTSP Kota Cimahi selama tahun 2021, sebagai komitmen kami untuk melaksanakan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP DPMPTSP Tahun 2021 berisi informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan program, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi DPMPTSP Kota Cimahi sesuai Rencana Strategis DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2021 tidak lepas dari kerjasama semua pihak, baik dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2021. Semoga LKIP DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2021 ini bermanfaat bagi kita semua dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Cimahi, Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODALDAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 199202 2 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan sarana pertanggungjawaban Kinerja sebagai masukan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis DPMPTS Kota Cimahi. LKIP ini menggambarkan pencapaian kinerja selama tahun 2020 dikaitkan dengan Rencana Kerja Tahun 2021 yang disusun mengacu pada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2017–2022 dan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017–2022.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, DPMPTSP Kota Cimahi untuk tahun 2020 melaksanakan 5 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021.

Selama Tahun Anggaran 2021, sumber anggaran berasal dari APBD dan DAK sebesar Rp.38.782.462.934,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 15.345.606.334,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 23.436.856.600,00, setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 37.579.264.634,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 15.179.265.634,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 22.399.999.000,00. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.275.037.195,00 **(75.24%)**, dengan capaian kinerja organisasi sebesar **4** (baik) dari skala **5**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
BAB 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 2
1.2.1 Tugas dan Fungsi 2
1.2.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2
1.2.3 Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4
1.3 Landasan Hukum 5
1.4 Isu Strategis 6
BAB 2
PERENCANAAN KINERJA 8
2.1 Rencana Strategis 8
2.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi 9
2.2.1 Visi 9
2.2.2 Misi 10
2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi 11
2.3.1 Tujuan 11
2.3.2 Sasaran 11
2.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi 11
2.4.1 Strategi 11
2.4.2 Kebijakan 11
2.5 Rencana Kinerja DPMPTSP 12
2.5.1 Program DPMPTSP 12
2.5.2 Kegiatan DPMPTSP 12
2.5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 14
2.5.4 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Cimahi 2021 26

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA 29

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 29

3.1.1 Pengukuran Kinerja 29

3.1.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran 39

3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 41

3.1.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 43

3.1.5 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 43

3.2. Realisasi Anggaran 43

BAB 4

PENUTUP 46

4.1 Kesimpulan 46

4.2 Hambatan dan permasalahan 46

4.3 S a r a n 47

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcomes* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi yang bersangkutan.

Secara operasional, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berwenang (pemberi mandat), sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian dalam rangka pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif dan transparan diharapkan setiap instansi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi menyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi Tahun 2020 berisikan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja serta Rencana Kerja Tahunan yang masing-masing memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah dicapai selama Tahun 2020.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, Kota Cimahi merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral. DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Sedangkan DPMPTSP memiliki fungsi:

a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

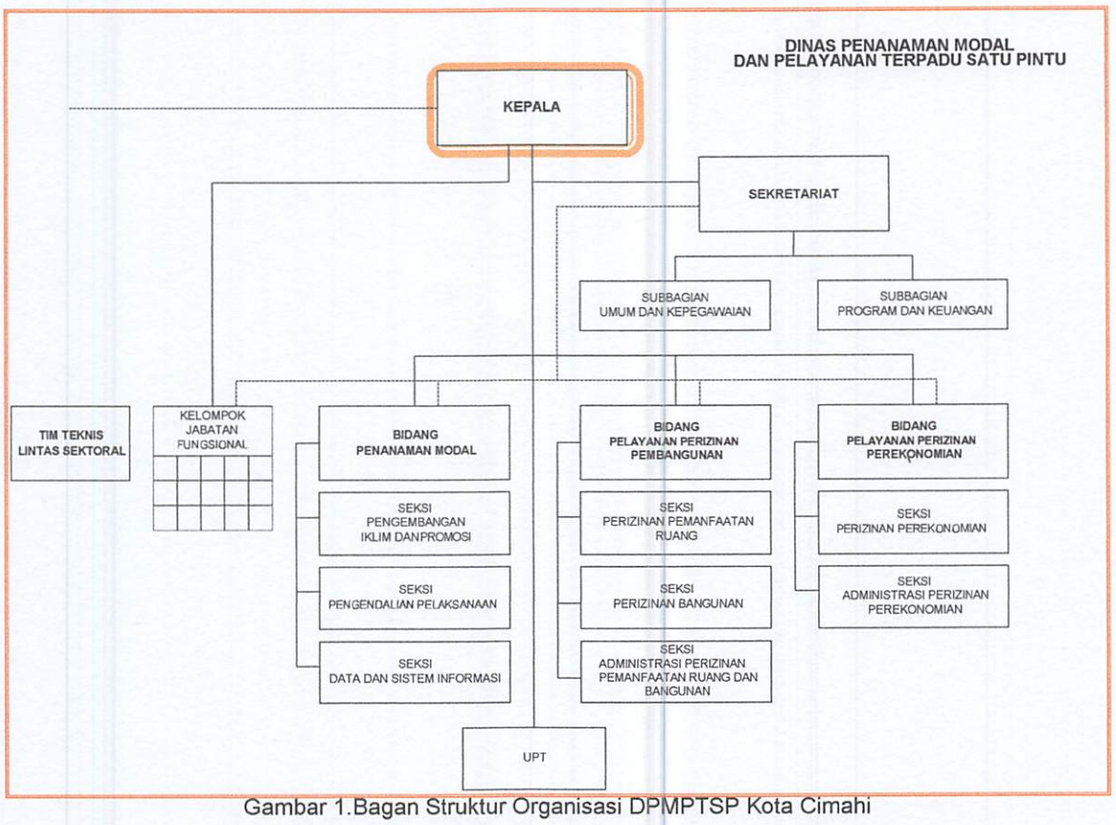
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah. PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Sedangkan penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

1.2.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
    a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
    a. Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi;
    b. Seksi Data dan Sistem Informasi;
    c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan.
4. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, membawahi :
    a. Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang;
    b. Seksi Perizinan Bangunan;
    c. Seksi Administrasi Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan.
5. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian, membawahi:
    a. Seksi Perizinan Perekonomian;
    b. Seksi Administrasi Perizinan Perekonomian.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi adalah sebagai berikut:



Gambar 1.Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Cimahi

Gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	S-2	10	29%
2.	S-1	18	53%
3.	D-4	1	3%
4.	D-3	2	6%
5.	SMA/SMK/MA	3	9%
	JUMLAH	34	100%

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Kepala	-	1	1
2.	Sekretaris	-	1	1
3.	Kepala Bidang	3	-	3
4.	Kepala Sub	1	1	2

	Bagian			
5.	Kepala Seksi	4	4	8
6.	Staf	9	10	19
	JUMLAH	**16**	**18**	**34**

Tabel 2. Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Berdasarkan Jenis Kelamin

1.2.3 Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal. Terkait tugas dan fungsinya, DPMPTSP membuat kebijakan-kebijakan terkait investasi dan perizinan, serta melaksanakan kegiatan untuk mempromosikan Kota Cimahi dan pelayanan perizinan.

Dalam pemberian izin dan urusan penanaman modal, DPMPTSP berkoordinasi dengan beberapa OPD, diantaranya:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
3. Dinas Lingkungan Hidup;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian;
7. Dinas Tenaga Kerja;
8. Dinas Pendidikan;
9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;
10. Dinas Kesehatan.

1.3 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
j. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
m. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal;
n. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.4 Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMPTSP Kota Cimahi mengalami hambatan dan tantangan. Beberapa yang menjadi isu strategis DPMPTSP Kota Cimahi adalah:

1. Penggalian data investasi untuk memperoleh data sesuai kondisi yang terjadi, agar tidak terjadi pengambilan kebijakan yang yang tidak sesuai;
2. Peningkatan penyebaran informasi mengenai investasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat agar tidak terjadi mispersepsi di masyarakat mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan perizinan di Kota Cimahi;
3. Perubahan drastis dalam sistem perizinan di Indonesia sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Online Single Submission (OSS) mengharuskan para pegawai DPMPTSP untuk memahami prosedur perizinan yang baru dan menjalankan sistem perizinan baru dalam waktu yang sangat cepat;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
5. Keterbatasan sumber daya manusia di DPMPTSP. Pada satu sisi jumlah PNS sangat terbatas, namun di sisi lain penambahan THL sangat dibatasi. Hal ini

menyebabkan satu orang pegawai mengerjakan beberapa pekerjaan, sehingga menghambat kelancaran pekerjaan di dalam DPMPTSP Kota Cimahi;

6. Selain keterbatasan pegawai, DPMPTSP Kota Cimahi juga memiliki keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pendidikan, sehingga jarang sekali pegawai yang mengikuti diklat atau pelatihan. Padahal pelatihan dan pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai;
7. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Kota Cimahi. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2021 IKM DPMPTSP Kota Cimahi adalah **83.01**;
8. Pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19;
9. Perubahan regulasi terkait pelayanan perizinan pasca dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempengaruhi pada tata laksana proses perizinan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh bagian pelayanan;
10. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 12 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 yang mengatur tentang proses perizinan berusaha di pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang merupakan pelaksanaan ketentuan pasal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang proses persetujuan bangunan dan gedung.

Isu-isu strategis yang dihadapi DPMPTSP Kota Cimahi mengurangi kinerja dan kelancaran pekerjaan, untuk itu harus ditangani secara bijaksana, intensif dan berkesinambungan, karena masalah yang terjadi kemungkinan akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Untuk itu upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut adalah:

1. Meningkatkan intensitas pendekatan terhadap para pelaku usaha agar diperoleh data yang lebih akurat terkait data-data penanaman modal dan perizinan;
2. Pelaksanaan sosialisasi investasi dan perizinan harus tepat sasaran. Selain itu koordinasi yang lebih intens dengan perangkat daerah di wilayah harus dilakukan;
3. Pegawai DPMPTSP harus menggali lagi regulasi-regulasi terbaru terkait penanaman modal dan perizinan, baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) mengenai penanaman modal dan perizinan, maupun dengan melakukan koordinasi yang lebih banyak dengan instansi provinsi dan pusat;
4. Pembangunan etos kerja dan karakter bekerja yang baik dapat meningkatkan kekompakan untuk mendukung pelaksanaan kerja tim DPMPTSP Kota Cimahi,

sehingga hambatan dan tantangan yang ada dapat dihadapi bersama agar terasa lebih ringan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang telah mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut, serta melakukan pengukuran hasil melalui umpan balik.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk menentukan pengukuran kinerja instansi/organisasi. Rencana strategis merupakan integrasi antara keahlian SDM dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan di bidang investasi diharapkan mampu memperlihatkan secara jelas hubungan antara cara/langkah yang akan diambil inisiator, pengelola, pelaksana dan pemanfaat atas berkembangnya investasi daerah. Ada 3 unsur yang berperan sekaligus sebagai inisiator, pengelola, pelaksana dan pemanfaat yang saling berkaitan pengaruhnya untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi dengan peran dan fungsi, sebagai berikut:

1. Pemerintah

   Pada dasarnya pemerintah memiliki peran dan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan indikator:

   a. Meningkatnya PDRB (*Product Domestic Ratio Brutto*) melalui peningkatan nilai tambah;
   b. Meningkatnya nilai tambah berarti akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
   c. Memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat;
   d. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional terhadap valuta asing.

2. Swasta

   Peran swasta dalam kegiatan investasi dan ekonomi adalah sebagai berikut:

   a. Berpartisipasi dalam kegiatan investasi langsung yang berwawasan lingkungan dibidang produksi dan jasa maupun investasi tidak langsung melalui pasar modal;
   b. Kontribusi sosial di bidang pendidikan/pelatihan, kesehatan dan fasilitas umum;
   c. Memenuhi kewajiban membayar pajak/ retribusi perizinan tertentu;
   d. Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

3. Masyarakat

   a. Memberikan dukungan sosial;
   b. Melakukan pengawasan sosial;
   c. Turut menegakkan stabilitas politik dan keamanan.

Sesuai ketentuan yang berlaku DPMPTSP telah membuat Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 tahun (2017-2022), sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi. Sesuai Renstra yang telah dibuat, pada tahun 2019 DPMPTSP Kota Cimahi mengalami penyesuaian Kegiatan dan Program.

2.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi

Visi merupakan pedoman dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap organisasi dengan baik, menggambarkan dengan jelas akan tujuan suatu organisasi dan fokus pada sasaran yang ingin dicapai kedepan. Misi merupakan penjabaran dari visi dan kedua-duanya harus sejalan.

2.2.1 Visi

Visi DPMPTSP pada Renstra 2017-2022 mengacu langsung pada visi RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 yang merupakan cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022, yaitu "Mewujudkan **Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya**". Berdasarkan RPJMD Kota Cimahi, pada visi RPJMD 2017-2022 terdapat 3 (tiga) kata kunci, yaitu Maju, Agamis dan Berbudaya, yang masing-masingnya memiliki penjabaran.

Pertama, **Maju**. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan. Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan berbagai ketetapan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas. Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas kepemerintahan.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Jati diri masyarakat yang substansinya membangun kepribadian dalam berkebudayaan akan menjadi pondasi kuat dalam membangun kesejahteraan rakyat, penggunaan wewenang ekonomi, politik dan tatakelola urusan daerah pada semua tingkat pemerintahan, hal ini menyangkut dimensi struktural, dimensi fungsional dan dimensi kultural dalam rangka mengendalikan perubahan berbasis kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Membangun jatidiri akan menjadi pondasi kuat dan rasional dalam pembuatan kebijakan, pengendalian dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.

2.2.2 Misi

Misi DPMPTSP masuk pada Misi ketiga RPJMD Kota Cimahi, yakni "**Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan**". Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan segala potensinya. Kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam, oleh karena itu, pembangunan Kota Cimahi harus menekankan pada kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan sektor jasa yang berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan upaya yang kreatif dalam segala bidang yang dilakukan melalui pengembangan potensi sosial dan budaya serta pengembangan ekonomi lokal yang memberikan peluang pada peningkatan Usaha Kecil Menengah.

2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi

2.3.1 Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berdasarkan pada visi dan misi serta urusan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP, tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, yaitu "**Meningkatnya laju pertumbuhan investasi**". Untuk dapat mengukur pencapaian tujuan, maka indikator dari tujuan DPMPTSP Kota Cimahi adalah laju pertumbuhan Investasi, berupa persentase pertumbuhan investasi per tahun.

2.3.2 Sasaran

Dengan mengacu pada Tujuan DPMPTSP Kota Cimahi, maka ditetapkan sasaran DPMPTSP untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu "Meningkatnya nilai investasi". Indikator untuk melihat pencapaian sasaran DPMPTSP Kota Cimahi adalah nilai realisasi investasi, berupa nominal realisasi investasi per tahun dan "Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan" dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM).

2.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi

2.4.1 Strategi

Strategi merupakan tahapan/langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara lebih efektif dan efisien. Oleh karenanya strategi harus dipertimbangkan dengan baik agar bisa mancapai sasaran. Sesuai Renstra DPMPTSP Kota Cimahi sasaran akan diupayakan tercapai melalui 2 (dua) strategi, yaitu:

1. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan.

2.4.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai target-target sasaran dan tujuan. Sesuai dengan Renstra Perubahan 2017-2022, maka arah kebijakan DPMPTSP Kota Cimahi adalah :

1. Peningkatan promosi penanaman modal;
2. Peningkatan Pelayanan Perizinan;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Peningkatan, Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

2.5 Rencana Kinerja DPMPTSP

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagai berikut :

2.5.1 Program DPMPTSP

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi terdiri dari:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
C. Program Pelayanan Penanaman Modal;
D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
E. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

2.5.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP

Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dari pencapaian Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Cimahi dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Cimahi adalah:

A. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sub KegiatanPengamanan Barang Milik Daerah SKPD
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
   b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

C. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
   b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasn Penanaman Modal

E. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Datadan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2.5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan kegunaannya, yang merupakan dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelahnya. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Cimahi dan merupakan petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja	:	Nilai SAKIP perangkat daerah, Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi, Persentase ASN yang memilki kesesuaian kompetensi
Kelompok Sasaran	:	DPMPTSP Kota Cimahi
Pendanaan Indikatif	:	APBD Kota Cimahi

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator Kinerja	:	Jumlah kebijakan penanaman modal
Kelompok Sasaran	:	Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPMPTSP Kota Cimahi.
Pendanaan Indikatif	:	APBD Kota Cimahi

C. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Kinerja	:	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM
Kelompok Sasaran	:	Pemohon izin dan Pelaku usaha di Kota Cimahi
Pendanaan Indikatif	:	APBD Kota Cimahi

D. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator Kinerja	:	Persentase jenis izin yang dilayani secara online
Kelompok Sasaran	:	Pemohon izin dan Pelaku usaha di Kota Cimahi
Pendanaan Indikatif	:	APBD Kota Cimahi

E. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Kinerja	:	Jumlah jenis izin yang dilayani sesuai standar
Kelompok Sasaran	:	Pemohon izin dan Pelaku usaha di Kota Cimahi
Pendanaan Indikatif	:	APBD Kota Cimahi

Rencana program dan kegiatan, sasaran strategis, indikator kinerja, target dan anggaran Tahun Anggaran 2021 DPMPTSP Kota Cimahi disusun sebagai berikut:

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegaiatn	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Indikator	Pagu Anggaran	Sumber Dana
I	**PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Kebijakan Penanaman Modal**	**Kota Cimahi**	**1 Kebijakan**	**445,291,600**	**APBD**
	KEGIATAN: Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pendukung Potensi Investasi**	**Kota Cimahi**	**1 Dokumen**	**160,000,000**	**APBD**
1	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pra FS Investasi	Kota Cimahi	2 Dokumen	160,000,000	APBD
	KEGIATAN: Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Fasilitasi Penanaman Modal**	**Kota Cimahi**	**7 Fasilitasi**	**285,291,600**	**APBD**
2	SUB KEGIATAN: Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Evaluasi Perizinan Penanaman Modal	Kota Cimahi	1 Dokumen	146,689,000	APBD
3	SUB KEGIATAN: Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Jumlah SK/Perwal Perizinan	Kota Cimahi	2 Perwal	138,602,600	APBD

	Kemudahan Penanaman Modal					
		Jumlah SOP (SK Kepala Dinas/Wali Kota)	Kota Cimahi	5 SOP		
II	**PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Jenis Izin yang Dapat Dilayani Sesuai dengan Standar Pelayanan**	**Kota Cimahi**	**3 Jenis Izin**	**857,939,400**	**APBD**
	KEGIATAN: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani**	**Kota Cimahi**	**64 Izin dan Non Izin**	**857,939,400**	**APBD**
4	SUB KEGIATAN: Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pengolahan Hasil Survey KRK	Kota Cimahi	1 Dokumen	102,048,300	APBD
5	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Perwal Perizinan	Kota Cimahi	1 Perwal	226,507,400	APBD
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis	Kota Cimahi	2 Dokumen		
6	SUB KEGIATAN: Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Dokumen/Laporan Layanan Konsultasi dan	Kota Cimahi	1 Dokumen	122,434,700	APBD

	terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pengaduan Masyarakat				
7	SUB KEGIATAN: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Launching MPP		1 Kegiatan	406,949,000	APBD
		Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terhadap OSS		4 Kali		
III	**PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM**	**Kota Cimahi**	**250 Perusahaan**	**532,562,000**	**APBD - DAK**
	KEGIATAN: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Kota Cimahi**	**3 Kegiatan**	**532,562,000**	**APBD - DAK**
8	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pelaporan Perusahaan NonSPIPISE	Kota Cimahi	1 Dokumen	48,050,400	APBD
9	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian Pendataan Perusahaan Wajib LKPM	Kota Cimahi	1 Dokumen	365,957,500	DAK

10	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitasi Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	Kota Cimahi	2 Kali Kegiatan	118,554,100	DAK
IV	**PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Tersedianya sistem penanaman modal yang terintegrasi di Kota Cimahi**	**Kota Cimahi**	**1 Sistem**	**802,581,000**	**APBD**
	KEGIATAN : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi**	**Kota Cimahi**	**32.81%**	**802,581,000**	**APBD**
11	SUB KEGIATAN: Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi yang Dibangun/Dikembangkan	Kota Cimahi	2 Aplikasi	802,581,000	APBD
		Jumlah modul yang dikembangkan		1 modul		
		Jumlah Konten Media Informasi	Kota Cimahi	3 Konten		
V	**PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Kota Cimahi**	**BB**	**35,615,752,734**	**APBD**

		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		**100%**		APBD
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		**80%**		
	KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani**	**Kota Cimahi**	**12 Bulan**	**50,400,000**	**APBD**
12	SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Unit Kendaraan Roda 2 yang Diasuransikan	Kota Cimahi	3 Unit	50,400,000	APBD
		Jumlah Unit Kendaraan Roda 4 yang Diasuransikan	Kota Cimahi	2 Unit		
	KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Pegawai yang Difasilitasi Bimtek**	**Kota Cimahi**	**60 Orang**	**65,600,000**	APBD
13	SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti/diselenggarakan	Kota Cimahi	1 Kegiatan	65,600,000	APBD
	KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun**	**Kota Cimahi**	**2 Dokumen**	**6,978,552,400**	**APBD**

14	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Cimahi	1 Dokumen	6,013,800	APBD
15	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Kota Cimahi	1 Dokumen	6,047,600	APBD
16	SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan	Kota Cimahi	48 Orang	6,966,491,000	APBD
	KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani**	**Kota Cimahi**	**12 Bulan**	**6,830,142,750**	**APBD**
17	SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Cimahi	12 Bulan	167,000,000	APBD
18	SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Untuk Pegawai	Kota Cimahi	12 Bulan	320,945,000	APBD
19	SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Cimahi	12 Bulan	109,575,650	APBD
20	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Peralatan Rumah	Kota	406 Buah	127,357,900	APBD

	Tangga	Tangga Tersedia	Cimahi			
21	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	Kota Cimahi	12 Bulan	5,930,314,200	APBD
		Jumlah penyediaan alat kantor dan rumah tangga	Kota Cimahi	327 Unit		
22	SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi	Kota Cimahi	12 Bulan	174,950,000	APBD
	KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani**	**Kota Cimahi**	**12 Bulan**	**606,060,000**	**APBD**
23	SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung	Kota Cimahi	12 Bulan	452,020,000	APBD
		Jumlah gedung yang dipelihara		1 Buah		
24	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan	Kota Cimahi	5 Unit	154,040,000	APBD

	KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani**	**Kota Cimahi**	**12 Bulan**	**19,120,393,484**	**APBD**
25	SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Interior Gedung Kantor	Kota Cimahi	1 Interior Gedung	19,120,393,484	APBD
		Jumlah Gedung yang Disewa	Kota Cimahi	2 Buah		
	KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani**	**Kota Cimahi**	**12 Bulan**	**1,741,377,000**	**APBD**
26	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Air, Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Jumlah Bulan Jasa Listrik	Kota Cimahi	12 Bulan	1,248,000,000	APBD
27	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Kebersihan Kantor	Kota Cimahi	12 Bulan	483,377,000	APBD
28	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	12 Bulan	10,000,000	APBD
	KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**Kota Cimahi**	**13 Dokumen**	**223,227,100**	**APBD**

29	SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Survey IKM	Kota Cimahi	1 Dokumen	159,693,700	APBD
		Jumlah Dokumen LKIP		1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen LKPJ & LPPD		1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Monev Triwulanan		4 Dokumen		
		Sertifikasi ISO		1 Sertifikat		
30	SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran	Kota Cimahi	2 Dokumen	35,773,000	APBD
		Jumlah Dokumen Renja		1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan		1 Dokumen		
		Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah		1 Kegiatan		

2.5.4 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Cimahi 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Rencana program dan kegiatan, sasaran strategis, indikator kinerja, target dan anggaran dipaparkan pada Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 DPMPTSP Kota Cimahi disusun sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. HELLA HAERANI**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LETKOL (PURN) NGATIYANA**

Jabatan : Plt. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2021

Pihak Kedua,

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI,

Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 199202 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83
2	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	7.170.150.000.000

	Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	34.940.890.634,00
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	445.291.600,00
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	857.939.400,00
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	532.562.000,00
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	802.581.000,00
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**37.579.264.634,00**

Cimahi, November 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI,

Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 199202 2 001

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan, berupa indikator masukan (*Input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara sesuatu yang diukur dengan alat ukur berupa indikator atau ukuran kinerja.

Dalam rangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data, kinerja dan cara pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang lazimnya diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Data internal (sistem informasi yang ditetapkan pada instansi);
2. Data eksternal (berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder).

Kinerja proram, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator, capaian kinerja tersebut pengukurannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DANA
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	7.170.150.000.000,00	APBD
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	APBD

3.1.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran diukur dengan membandingkan target sasaran strategis dengan realisasinya, kemudian beberapa indikator dalam satu sasaran strategis dirata-ratakan dengan menggunakan perhitungan rata-rata tertimbang, yang hasilnya menjadi nilai pencapaian sasaran.

Tabel Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	$= \frac{(\text{Realisasi investasi thn n} - \text{Realisasi investasi thn n} - 1)}{\text{Realisasi investasi thn n} - 1} \times 100\%$	Bidang Penanaman Modal
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ $\text{Bobot Nilai Rata2 Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0.071$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM (antara 25-100), maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus : IKM unit pelayanan x 25	Bidang Perizinan

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2021 DPMPTSP Kota Cimahi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA (%)
				TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	7.170.150.000.000	4.720.796.554.068	65.83
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	83	83.01	100.01

Sasaran peningkatan pertumbuhan investasi dengan indikator laju pertumbuhan investasi pada tahun 2021 menunjukkan target realisai capaian sebesar Rp. 4.720.796.554.068,00 atau sebesar 65.83% dari target Rp. 7.170.150.000.000,00, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 299 perusahaan melaporkan LKPM. Proses pelayanan perizinan ini kemudian dimonitoring melalui survey kepuasan masyarakat yang menghasilkan indeks kepuasan masyarakat yang merupakan indikator kinerja utama DPMPTSP Kota Cimahi. Survey dilakukan untuk menghimpun dan memberikan gambaran penilaian masyarakat terhadap proses perizinan dari mulai proses permohonan sampai dengan penerbitan izin. Hasil dari survey ini pada akhirnya akan

memberikan gambaran proses pelayanan perizinan yang berlangsung pada unit pelayanan di DPMPTSP Kota Cimahi selama tahun 2021.

Data akhir Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap unit pelayanan, disusun dengan materi utama dan hasilnya sebagai berikut:

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR per unsur	NRR tertimbang per unsur
1	Persyaratan Pelayanan	3.637	0.400
2	Prosedur Pelayanan	3.262	0359
3	Waktu Pelayanan	2.857	0.314
4	Biaya/Tarif	3.795	0.417
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.257	0.358
6	Kompetensi Pelayanan	3.324	0.366
7	Perilaku Pelaksana	3.338	0.367
8	Penanganan Pengaduan	3.133	0345
9	Sarana dan Prasarana	3.581	0.394
Nilai Indeks (NI)			**3.320**
Nilai IKM setelah dikonversi (NI x 25)			**83.01**

Dengan demikian, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai Dasar = 3.320 x 25 = **83.01**

b. Mutu pelayanan **B**.

c. Kinerja unit pelayanan **Baik.**

Peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan oleh DPMPTSP Kota Cimahi tahun 2021 secara umum berjalan sesuai dengan rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 - 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI					TARGET RENSTRA TAHUN 2021	CAPAIAN Thn 2021 Thd Renstra
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	7.213.569.420.186	8.953.319.609542	9.744.433.463.274,47	9.061.090.000.000	24.410.560.302.066	7.170.150.000.000	4.720.796.554.068
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	N/A	75	78	80,9	82.03	83	83.01

Dari hasil tabel perbandingan kinerja di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi untuk indikator survey kepuasan masyarakat setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada kegiatan yang menunjang capaian target survey kepuasan masyarakat memberikan hasil yang maksimal. Sementara itu pada target realisasi peningkatan pertumbuhan investasi, pada tahun 2018 proses pelaporan investasi melalui LKPM masih dilakukan secara manual dan belum diberlakukannya sanksi bagi perusahaan yang tidak melaporkan LKPM ke BKPM, dan pada tahun 2019 proses pelaporan LKPM sudah diberlakukan secara online melalui *OSS* secara terjadwal setiap 3 bulan sekali, dimana setiap perusahaan mendapatkan pemberitahuan secara langsung melalui alamat akun email yang sudah didaftarkan melalui *OSS* dan akan diberikan surat peringatan dari BKPM bagi perusahaan yang sampai dengan waktu yang sudah ditentukan tidak juga melaporkan hasil laporan LKPM-nya, sebelum kemudian akan diberikan sanksi oleh BKPM.

Pemberlakuan jadwal yang sudah ditetapkan dalam pelaporan LKPM dan surat peringatan serta sanksi inilah yang menyebabkan pada tahun 2021 jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM melebihi target capaian yaitu sejumlah 299 perusahaan dengan jumlah total realisasi investasi yang dilaporkan melalui LKPM sebesar Rp. 4.720.796.554.068 atau sebesar 65.83% dari target Rp. 7.170.150.000.000,00.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

NO	SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		KETERANGAN
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Rupiah	9.061.090.000.000	24.410.560.302.066	7.170.150.000.000	4.720.796.554.068	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks	82	82.03	83	83.01	

3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *Output* dan *Input* baik untuk rencana maupun realisasi, analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *Output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *Input* tertentu, selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan hasil serta manfaat dan dampak. Evaluasi kinerja juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya perbedaan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Analisis atas capaian kinerja DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Realisasi Investasi

   Capaian realisasi investasi didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2021 diantaranya adalah pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Kota Cimahi, pembuatan dokumen investasi, sosialisasi *OSS RBA*, Capaian realisasi investasi juga dipengaruhi oleh proses pelaporan LKPM yang dilakukan oleh para pengusaha yang sebelumnya melalui portal NSWI, tetapi semenjak diberlakukannya *OSS RBA*, maka setiap pengusaha yang akan melaporkan LKPM masuk melalui portal *OSS RBA*.Selain itu sejak BKPM mulai melakukan email blast kepada pengusaha mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pengusaha yang tidak melaporkan LKPM, jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM setiap tahunnya selalu bertambah. Tetapi Pada tahun 2021 peningkatan jumlah perusahaan yang

melaporkan LKPM tidak berbanding lurus dengan capaian nilai realisasi investasi yang hanya mencapai 65.83% dari target yaitu hanya sebesar Rp. 4.720.796554.068,00 hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya yaitu : tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih sangat rendah akibat pandemi Covid 19, menyebabkan tidak banyak pengusaha dengan jumlah modal besar menanamkan modalnya di Kota Cimahi, sementara itu kebanyakan capaian realisasi invetasi pada tahun 2021 adalah laporan investasi yang berasal dari UMKM. Hal ini justru menunjukkkan bahwa pada saat pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat pandemi Covid-19 tidak berpengaruh pada sektor UMKM yang justru pertumbuhannya semakin meningkat tajam, dan memberikan kontribusi yang tinggi pada capaian nilai realisasi investasi tahun 2021.

Solusi :

1. Meningkatkan koordinasi dengan dinas lain terkait, misal Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menenngah, dan Perindustrian serta Dinas Lingkungan Hidup, untuk memperoleh data mengenai pelaku usaha/ perusahaan di Kota Cimahi. Dibentuknya Satuan Tugas (*Task Force*) Penanganan Permasalahan Penanaman Modal yang dapat mempercepat segala permasalahan penanaman modal dan penyelesaiannya.
2. Penyederhanaan persyaratan bagi pelaku usaha sebagai salah satu insentif/rangsangan bagi pengembangan UMKM. Seperti yang tertuang dari hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan yang menunjukkan aspirasi masyarakat mengenai kemudahan berusaha bagi UMKM.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara langsung, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi sangat ditentukan oleh penilaian yang dilakukan oleh warga sebagai pengguna layanan yang dilaksanakan dalam bentuk survey kepuasan masyarakat. Setiap tahunnya survey dilakukan untuk mendapatkan *feedback* dari masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Pada tahun 2021 target untuk nilai indeks kepuasan masyarakat adalah 83, target tersebut dapat dicapai dengan realisasi sebesar 83.01 atau 100.01% dari target. Tercapainya indikator kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada bagian pelayanan perizinan dan penanaman modal. Proses terhadap perizinan berusaha yang lebih mudah melalui akses *OSS RBA* dan proses penerbitan izin yang semakin cepat serta dapat dipantau secara langsung oleh pemohon. Dalam prosesnya, pengajuan permohonan perizinan ini pada beberapa kasus membutuhkan konsultasi yang cukup mendalam antara pihak pemohon, DPMPTS dan dinas teknis terkait, proses konsultasi ini dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap proses penerbitan izin karena pada proses penerbitan izin ini biasanya ditemukan kendala-kendala teknis dan administrasi yang dihadapi oleh pemohon sehingga melalui proses konsultasi dapat dihasilkan kejelasan sampai dengan

penerbitan izin. Selain konsultasi, proses pengaduan yang dilaksanakan pada bagian pelayanan perizinan pembangunan, merupakan salah satu unsur yang memberikan pengaruh yang signifikan pada penilaian kepuasan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari nilai kepuasan masyarakat untuk unsur pengaduan masyarakat mendapatkan nilai **baik.** Sementara itu, dari 9 (sembilan) unsur pelayanan yang disurvey, unsur waktu pelayanan merupakan unsur yang mendapatkan nilai terendah, dengan upaya perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan review terhadap durasi pelayanan;
2. Melakukan penyederhanaan prosedur.

Dari capaian realisasi investasi tahun 2021 dapat dilihat bahwa pengaruh pandemi Covid 19 masih memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap sentimen pengusaha dalam menanamkan modalnya terutama investasi yang bernilai besar di atas Rp 500.000.000,0 hal ini justru berbanding terbalik dengan nilai investasi modal yang dihasilkan dari UMKM yang memberi kontribusi yang besar.

3.1.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SUMBER DAYA	KONDISI	CAPAIAN 2021	EFISIENSI	KETERANGAN
1	Jumlah dana	37.579.264.634	28.275.037.195	24.75%	Dana digunakan untuk 30 Kegiatan
2	Pegawai	PNS : 34 orang THL : 16 orang	PNS : 34 orang THL : 16 orang	-	Dengan izin yang ditangani oleh DPMPTSP Kota Cimahi lebih dari 60 izin, SDM yang ada sangat kurang untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPMPTSP. Sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi masih belum optimal.
3	Waktu	12 bulan	12 bulan	-	Semua capaian kinerja dilaksanakan dalam waktu 12 bulan
4	Sarana Prasarana	Ruangan; Mebelair; Peralatan kerja	Ruangan; Mebelair; Peralatan kerja	-	Semua sarana prasarana digunakan secara maksimal

Dengan jumlah izin yang dikelola sejumlah lebih dari 60 buah izin, SDM yang ada dirasa sangat kurang sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi yang dicapai belum optimal. Namun demikian, setiap individu dalam organisasi tetap berupaya untuk melaksanakan yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing secara maksimal.

3.1.5 Analisis Program atau Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dari 2 (dua) sasran kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi pada tahun 2021 terdapat satu sasaran yang belum tercapai yaitu :

1. **Nilai realisasi investasi (belum tercapai)**
2. **Nilai indeks kepuasan masyarakat (tercapai)**

Dari 5 program Seluruh program dan 30 sub kegiatan pada DPMPTSP Kota Cimahi tahun 2021 menunjang pada keberhasilan pencapaian pernyataan/perjanjian kinerja, namun beberapa belum optimal dalam pelaksanaannya. Dalam artian semua kegiatan dapat terlaksana kecuali kegiatan Launching Gedung MPP dikarenakan proses pembangunan fisik dan interior gedung yang belum 100% terbangun. Sasaran strategis dinas yang merupakan IKU DPMPTSP tahun 2021 tercapai. Capaian realisasi nilai investasi sebesar Rp. 4.720.796.554.068,00 atau 65.83% dari target yang sudah

ditetapkan sebesar Rp. 7.170.150.000.000,00 memperlihatkan bahwa dalam kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Kota Cimahi masih mampu menarik investor untuk menanamkan investasinya, walaupun capaian yang kurang dari target. Kondisi inipun harus dikaji ulang untuk menetapkan target nilai investasi di tahun-tahun yang akan datang sehingga antara target dan capaian tidak akan terlalu besar selisihnya. Sementara itu capaian nilai IKM sudah sesuai target yaitu sebesar 83.01 atau 100.1% dari target nilai 83.

Secara umum, seluruh hasil realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan berperan dalam pencapaian target kinerja utama tahun 2021. Pencapaian target kinerja ini juga didukung dengan adanya ketersediaan anggaran yang dibelanjakan secara optimal guna mencapai sasaran kinerja bagi masing-masing program dan kegiatan yang menunjang pada pencapaian target kinerja utama DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2021.

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk DPMPTSP Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 37.579264.634,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.275.037.195,00 **(75.24%)** sehingga sisa anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 9.304.227.439,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 15.179.265.634,00 dengan sedangkan untuk alokasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 22.399.999.000,00

Untuk perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran berdasarkan program dijabarkan dalam tabel berikut.

No	Program	Anggaran		Capaian (%)	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (%)	Realisasi (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.940.890.634	26.015.531.437	100	74.45
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	445.291.600	432.541.600	100	97.13
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	857.939.400	645.518.340	100	75.24
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	530.062.000	427.457.900	100	80.64
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	802.581.000	753.987.918	100	93.94
		37.579.264.634	28.275.037.195	100	75.24

BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi dengan mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi menyajikan hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Sebagai instansi yang bertugas di dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi secara keseluruhan dapat mencapai target-target dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk urusan Penanaman Modal, memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, pelaku usaha dan lainnya.

4.2 Hambatan dan permasalahan

Hambatan dan permasalahan yang terjadi selama Tahun Anggaran 2021, diantaranya:

1. Penyesuaian peraturan perundang-undangan/regulasi baru mengenai proses perizinan yang menyebabkan perubahan SOP dan mempengaruhi pada beberapa proses pelayanan peizinan.
2. Kurangnya bimbingan teknis dan pelatihan terkait diberlakukannya peraturan perundang-undangan dan sistem baru terkait proses perizinan yang menyebabkan kurangnya kapasitas pegawai dalam memahami dan melaksanakan pelayanan perizinan sesuai dengan aturan baru yang berlaku.
3. Perbandingan antara jumlah pegawai dengan jumlah izin yang ditangani dirasakan masih belum seimbang, saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) seluruhnya 34 orang dengan jumlah izin yang ditangani lebih dari 60 jenis izin. THL yang berjumlah 16 orang masih belum dapat menyeimbangkan beban pekerjaan dengan jumlah pegawai.
4. Pelayanan perizinan masih belum dapat berjalan secara optimal khususnya masalah ketepatan waktu proses. Seringkali terjadi keterlambatan penyelesaian izin karena:

- standar pelayanan yang belum diterapkan secara baik terutama oleh dinas teknis terkait dalam menerbitkan rekomendasi;
- keterbatasan sumber daya manusia pendukung pelayanan perizinan.

4.3 S a r a n

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi guna meningkatkan pelayanan perizinan secara prima, disarankan sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan pegawai agar proses pelayanan perizinan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
2. Perlunya perubahan sistem pelayanan agar tercapai efisiensi waktu dan sumber daya manusia (SDM). Perubahan tersebut antara lain melakukan setting ulang penempatan dan pembagian SDM sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan oleh masing-masing fungsi pelayanan (customer service, informasi, verifikasi berkas, data entry, petugas lapangan, penyerahan izin dan pembuatan SKRD/laporan).
3. Perlunya peningkatan wawasan dan kapasitas pegawai melalui kegiatan Diklat, Bintek, Pendidikan Berjenjang lainnya, serta Pembinaan Pegawai (Outbond).
4. Perlunya peningkatan wawasan atas kemajuan teknologi dan metode pelaksanaan agar tercapai pelayanan prima.
5. Perlunya penerapan SP dan SOP secara konsisten.
6. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam fungsi sebagai PTSP maupun dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik nantinya.

LAMPIRAN

PENGOLAHAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN Berdasarkan Permenpan No.14 Tahun 2017
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
2021

NO	JENIS IZIN	NILAI UNSUR PELAYANAN								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	Lain-lain	3	3	3	3	3	3	3	3	4
2	Lain-lain	3	4	3	4	3	3	3	3	4
3	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	SIUP / TDP	4	3	2	4	4	4	4	3	4
5	Lain-lain	3	3	2	4	3	3	3	2	3
6	KRK	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	3	3	2	2	3	3	3	3	3
8	KRK	3	3	2	2	3	3	3	3	3
9	Izin-Izin Kesehatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Izin-Izin Kesehatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	3	3	2	3	3	3	3	3	3
12	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	3	3	3	3
13	Izin-Izin Kesehatan	4	3	3	4	3	4	3	4	4
14	Lain-lain	4	4	3	4	4	4	4	4	4
15	Izin-Izin Kesehatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	SIUP / TDP	3	4	3	4	4	4	4	3	4
17	KRK	3	3	3	3	3	3	3	3	4
18	Lain-lain	3	3	3	4	3	3	3	3	3
19	Lain-lain	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	KRK	3	3	3	4	3	4	3	3	3
21	Lain-lain	3	3	3	4	3	3	3	3	3
22	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	Lain-lain	3	3	2	4	2	3	3	4	4
24	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	4	4	4	3	4	4	4	4	4
25	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4
26	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	2	3
27	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	3	3	3	3
28	Lain-lain	4	3	3	4	3	3	3	3	4
29	SIUP / TDP	4	4	4	4	4	4	4	3	4
30	SIUP / TDP	4	4	4	4	4	4	4	3	4
31	IUI / TDG / SIUJK / TDUP	4	4	4	4	4	4	4	3	4
32	IUI / TDG / SIUJK / TDUP	4	4	4	4	4	4	4	3	4
33	Izin-Izin Kesehatan	3	3	1	4	3	2	3	2	1
34	Lain-lain	3	3	2	4	3	3	4	3	1
35	Izin-Izin Kesehatan	4	4	2	4	3	3	3	3	4
36	SIUP / TDP	4	3	3	4	3	3	3	3	4
37	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	3	3	3	4
38	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	4	3	2	3
39	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	3	3	2	3
40	Lain-lain	3	4	2	4	4	3	3	4	3
41	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4
42	Izin-Izin Kesehatan	4	3	3	4	3	4	3	3	4
43	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	4	4
44	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	3	3	3	3
45	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	3	3	2	2	2	3	3	3	4
46	SIUP / TDP	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	KRK	4	4	2	4	3	3	4	3	3
48	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	4	3	3	4	4	4	4	4	4
49	Lain-lain	3	3	3	3	3	3	3	3	1
50	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	Lain-lain	2	2	2	4	3	3	3	2	3
52	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	3	2	2	2	3	3	3	2	3
53	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	3	3	3	4
54	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	2	4
55	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	3	3	2	3
56	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	3
57	Lain-lain	3	3	3	4	3	3	3	3	4
58	Izin-Izin Kesehatan	4	4	3	4	3	3	3	3	3
59	Izin-Izin Kesehatan	4	4	2	4	3	3	3	3	4
60	Lain-lain	2	1	1	2	2	4	3	2	3
61	Izin-Izin Kesehatan	3	2	1	4	3	3	3	3	1
62	Izin-Izin Kesehatan	3	4	3	4	3	3	3	3	4
63	Izin-Izin Kesehatan	3	4	3	4	3	3	3	3	4
64	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	3	3	3	4
65	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	3	4	3	4
66	Izin-Izin Kesehatan, Lain-lain	3	3	2	4	3	3	3	3	3
67	Izin-Izin Kesehatan	3	3	4	4	3	4	3	3	4
68	Izin-Izin Kesehatan	3	4	3	4	3	3	3	3	4
69	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame, KRK	3	3	3	4	3	3	3	3	3
70	Izin-Izin Kesehatan	4	4	3	4	4	4	4	4	4
71	Lain-lain	3	3	2	4	3	3	4	3	4
72	Lain-lain	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	Izin-Izin Kesehatan	3	2	2	4	3	3	3	3	3
74	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	3	3	3	3	3	1
75	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	3	3	3	4
76	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	2	3	3	3	3	3
77	Lain-lain	3	4	3	4	3	3	3	3	3

78	Lain-lain	3	3	3	4	3	3	3	3	3		
79	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	4	4	4	3	3		
80	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	3	1	1	4	3	3	3	3	4		
81	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	4	3		
82	Lain-lain	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
83	Izin-Izin Kesehatan	3	3	4	4	3	3	4	4	4		
84	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	3	3	3	3	3	4		
85	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
86	SIUP / TDP	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
87	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	3	3	3	4	4	4	4	3	4		
88	Izin-Izin Kesehatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
89	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	4	3	4		
90	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	3		
91	KRK	3	4	3	4	4	3	4	3	3		
92	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	3	3	3	3	2	3		
93	Lain-lain	3	3	2	3	3	3	3	3	4		
94	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	2	3		
95	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
96	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	4	3	4		
97	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
98	Izin-Izin Kesehatan	3	4	3	4	4	4	3	4	4		
99	Izin-Izin Kesehatan	3	4	3	4	4	3	3	3	4		
100	Izin-Izin Kesehatan	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
101	Lain-lain	3	3	2	4	3	3	3	3	4		
102	Izin-Izin Kesehatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
103	Izin-Izin Kesehatan	4	3	3	4	4	4	3	4	4		
104	Izin-Izin Kesehatan	3	4	4	4	3	4	4	4	4		
105	KRK	3	2	3	4	3	3	3	2	4		
106	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	3	3	4	3	3	4		
107	Lain-lain	3	3	3	4	3	3	4	3	4		
108	KRK	4	4	3	4	3	3	3	3	4		
109	Izin-Izin Kesehatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
110	KRK	3	1	1	4	2	3	3	2	4		
111	Lain-lain	3	3	3	4	3	3	3	3	3		
112	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	3	3	3	3	2	3		
113	Izin-Izin Kesehatan, Lain-lain	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
114	Lain-lain	3	3	3	2	3	3	3	3	4		
115	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	3	3	3	3	3	3	3	2	4		
116	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	3	3	3	3	3	4		
117	Izin-Izin Kesehatan	3	4	2	4	4	4	4	4	4		
118	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	3	3	3	4	3	4	4	3	4		
119	Izin-Izin Kesehatan	3	3	1	4	3	3	3	2	3		
120	Izin-Izin Kesehatan	3	3	1	4	3	3	3	2	3		
121	Izin-Izin Kesehatan	3	2	1	4	3	3	3	2	3		
122	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
123	Izin-Izin Kesehatan	4	3	3	4	4	3	4	4	4		
124	Izin Trayek / IUA / Kartu Pengawasan	3	3	3	3	3	3	4	3	4		
125	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	2	3		
126	Izin-Izin Kesehatan, Lain-lain	3	4	4	4	4	4	4	4	1		
127	SIUP / TDP, Lain-lain	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
128	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	3	3	2	3		
129	Izin-Izin Kesehatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
130	Lain-lain	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
131	Lain-lain	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
132	Lain-lain	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
133	Izin-Izin Kesehatan	3	3	4	4	3	4	4	4	4		
134	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
135	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	3	3	4	4	3	4	4	3	4		
136	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	3	4	4	4	3	3	4	3	4		
137	Lain-lain	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
138	KRK	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
139	Izin-Izin Kesehatan	3	4	3	4	4	4	3	3	4		
140	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	2	3	3	3	2	4		
141	Lain-lain	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
142	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
143	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
144	Izin-Izin Kesehatan	4	3	2	4	3	3	4	4	4		
145	Izin-Izin Kesehatan	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
146	Lain-lain	4	4	2	4	3	3	3	2	4		
147	Lain-lain	4	3	3	4	3	3	3	2	3		
148	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
149	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	3		
150	Izin-Izin Kesehatan	2	3	3	4	3	3	3	3	3		
151	Lain-lain	3	3	2	4	3	3	3	3	3		
152	Izin-Izin Kesehatan	3	3	1	3	3	3	3	3	4		
153	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	3	3	3	4		
154	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	3	3	2	4	3	3	3	3	1		
155	KRK	4	4	3	4	3	4	4	4	4		
156	KRK	4	3	3	4	3	4	4	4	4		
157	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4		
158	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	3	3	3	4		
159	Lain-lain	3	3	2	4	3	3	3	2	4		
160	Izin-Izin Kesehatan, Lain-lain	3	2	2	2	3	3	3	3	3		
161	KRK	3	3	3	4	4	4	4	4	4		
162	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
163	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	3	3	3	3	3	4		

164	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	3			
165	Izin Trayek / IUA / Kartu Pengawasan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
166	Izin-Izin Kesehatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
167	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	3	3	3	4			
168	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	3	3	3	4	3	3	3	3	4			
169	Lain-lain	3	4	2	4	3	3	3	3	3			
170	Izin-Izin Kesehatan	3	3	1	4	3	3	2	2	4			
171	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	3			
172	Izin-Izin Kesehatan	3	3	1	4	3	3	3	3	3			
173	Izin-Izin Kesehatan	3	3	1	4	3	3	3	3	3			
174	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	3	3	3	4			
175	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4			
176	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	4	4	4	3	4	4	4	4	4			
177	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	2	4			
178	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	4	3	3	3	3	4			
179	Izin-Izin Kesehatan	4	4	4	4	3	3	3	3	4			
180	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	4	2	4			
181	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4			
182	Izin-Izin Kesehatan	3	2	1	4	3	3	3	2	3			
183	Izin-Izin Kesehatan	3	3	1	4	3	3	3	3	1			
184	Izin-Izin Kesehatan	3	3	2	3	3	3	3	3	3			
185	KRK	3	3	3	3	3	3	3	3	4			
186	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4			
187	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4			
188	Izin-Izin Kesehatan	3	3	1	4	3	3	3	3	1			
189	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4			
190	Izin-Izin Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	3			
191	Lain-lain	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
192	Izin-Izin Kesehatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
193	Izin-Izin Kesehatan	4	4	4	4	4	4	4	4	3			
194	Izin-Izin Kesehatan	3	4	4	4	4	4	4	4	4			
195	Izin-Izin Kesehatan	4	4	4	4	4	4	4	3	4			
196	Lain-lain	4	4	4	4	3	4	4	4	4			
197	Lain-lain	4	4	3	4	4	4	3	4	4			
198	Izin-Izin Kesehatan	4	4	4	4	4	3	4	4	4			
199	Izin-Izin Kesehatan	4	3	4	4	4	4	4	3	3			
200	Izin-Izin Kesehatan	4	4	4	4	3	4	4	4	4			
201	Lain-lain	4	4	4	3	4	4	3	4	4			
202	Izin-Izin Kesehatan	4	4	4	4	4	3	4	4	4			
203	Izin-Izin Kesehatan	4	4	4	4	4	4	4	3	3			
204	IMB / Pengesahan Gambar / Izin Reklame	4	4	4	4	3	4	4	4	4			
205	KRK	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
206	KRK	3	4	4	4	4	4	4	4	4			
207	Izin-Izin Kesehatan	4	4	3	4	4	4	4	4	4			
208	Izin-Izin Kesehatan	4	3	4	4	3	4	4	4	4			
209	Lain-lain	4	4	4	4	4	4	3	4	4			
210	Izin-Izin Kesehatan, Lain-lain	4	4	4	4	4	4	4	3	4			
SNilai /Unsur		601	685	600	797	684	698	701	658	752			
NRR / Unsur		3.637	3.262	2.857	3.795	3.257	3.324	3.338	3.133	3.581			
NRR tertbg/ unsur		0.400	0.359	0.314	0.417	0.358	0.366	0.367	0.345	0.394	*)	3.220	
											**)	83.007	

IKM Unit pelayanan

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0.11

No.	UNSUR PELAYANAN
U1	Persyaratan
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
U3	Waktu Penyelesaian
U4	Biaya/Tarif
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Sarana dan prasarana
U9	Penanganan Pengaduan
	IKM UNIT PELAYANAN : **83.01**

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
B (Baik) : 62,51 - 81,25
C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50
D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75

Cimahi, Desember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi

Dra. HELLA HAERANI
NIP. 196602141992022001

Lampiran Surat Keterangan
No. : 503/ 089 /I/DPMPTSP/2022
Tanggal: 14 Januari 2022

DATA INVESTASI KOTA CIMAHI
TAHUN 2021

TOTAL INVESTASI		JUMLAH
LKPM	Rp	991,688,273,434
OSS	Rp	3,729,108,280,634
JUMLAH	**Rp**	**4,720,796,554,068**

LKPM		
Periode Investasi	**Jumlah**	
Triwulan I	Rp	330,613,499,108
Triwulan II	Rp	464,323,917,600
Triwulan III	Rp	120,326,981,108
Triwulan IV	Rp	76,423,875,618
Total	**Rp**	**991,688,273,434**

OSS

No.	Nama Perusahaan	NIB	KBLI	SEKTOR	Investasi	
1	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	42217.B	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL	Rp	12,500,000
2	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	42219.B	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL	Rp	12,500,000
3	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	43212.B	KONSTRUKSI KHUSUS	Rp	12,500,000
4	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	46100	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	12,500,000
5	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	46511	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	12,500,000
6	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	46512	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	12,500,000
7	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	46521	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	12,500,000
8	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	46523	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	12,500,000
9	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	46599	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	12,500,000
10	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	46491.B	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	12,500,000
11	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	58200	AKTIVITAS PENERBITAN	Rp	12,500,000
12	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	62012	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGI	Rp	12,500,000
13	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	62019	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGI	Rp	12,500,000
14	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	62021	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGI	Rp	12,500,000
15	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	62029	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGI	Rp	12,500,000
16	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	62090	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGI	Rp	12,500,000
17	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	95110	REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN P	Rp	12,500,000
18	ADIKARYA INFINIT	1285000132324	95120	REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN P	Rp	12,500,000
19	AGRA MAHKOTA DESAIN	261010233507	71102.B	AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI T	Rp	275,000,000
20	BIG DEAL CREATIVE	232000911349	14120	INDUSTRI PAKAIAN JADI	Rp	50,000,000
21	BIG DEAL CREATIVE	232000911349	17022	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS	Rp	50,000,000
22	BIG DEAL CREATIVE	232000911349	18111	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	Rp	50,000,000
23	BIG DEAL CREATIVE	232000911349	41019.B	KONSTRUKSI GEDUNG	Rp	50,000,000
24	BIG DEAL CREATIVE	232000911349	47591	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	50,000,000
25	BIG DEAL CREATIVE	232000911349	47712	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	50,000,000
26	BIG DEAL CREATIVE	232000911349	47714	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	50,000,000
27	BIG DEAL CREATIVE	232000911349	58200	AKTIVITAS PENERBITAN	Rp	50,000,000
28	BIG DEAL CREATIVE	232000911349	62090	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGI	Rp	50,000,000
29	BIG DEAL CREATIVE	232000911349	73100	PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR	Rp	50,000,000
30	BINTANG WARNA MANDIRI	9120408201825	46411	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	8,500,000,000
31	BINTANG WARNA MANDIRI	9120408201825	46419	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	8,500,000,000
32	CIPTA UTAMA LESTARI	220008621106	46411	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	12,000,000
33	CIPTA UTAMA LESTARI	220008621106	46412	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	12,000,000
34	CIPTA UTAMA LESTARI	220008621106	46413	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	12,000,000
35	CIPTA UTAMA LESTARI	220008621106	46414	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	12,000,000
36	CIPTA UTAMA LESTARI	220008621106	46511	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	12,000,000
37	CIPTA UTAMA LESTARI	220008621106	46512	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	12,000,000
38	CIPTA UTAMA LESTARI	220008621106	46491.B	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	12,000,000
39	DAEKUSIK AKODIA SOLUTION	1218000142205	43217.B	KONSTRUKSI KHUSUS	Rp	400,000,000
40	DAEKUSIK AKODIA SOLUTION	1218000142205	43221.B	KONSTRUKSI KHUSUS	Rp	400,000,000
41	DAEKUSIK AKODIA SOLUTION	1218000142205	43224.B	KONSTRUKSI KHUSUS	Rp	400,000,000
42	DAEKUSIK AKODIA SOLUTION	1218000142205	43291.B	KONSTRUKSI KHUSUS	Rp	400,000,000
43	DAEKUSIK AKODIA SOLUTION	1218000142205	46100	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	400,000,000
44	DAEKUSIK AKODIA SOLUTION	1218000142205	46521	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	400,000,000
45	DAEKUSIK AKODIA SOLUTION	1218000142205	46599	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	400,000,000
46	DIRDY PELANGI ANUGERAH	1286000121716	82910	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANT	Rp	520,000,000
47	DIRDY PELANGI PERSADA	1227000122273	82910	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANT	Rp	520,000,000
48	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46100	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
49	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46203	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
50	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46311	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
51	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46312	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
52	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46313	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
53	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46314	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
54	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46321	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000

55	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46322	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
56	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46412	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
57	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46413	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
58	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46419	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
59	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46421	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
60	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46422	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
61	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46495	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
62	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46496	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
63	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46499	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
64	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46319.A	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
65	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	46491.A	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	160,000,000
66	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	79112	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA	Rp	160,000,000
67	DUTA WISATA HAROMAIN	1296000132776	79120	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA	Rp	160,000,000
68	ERKA PLASINDO ABADI	1205000102217	22220	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK	Rp	800,000,000
69	HARMONI UTAMA TEKSTIL	9120312201762	13921	INDUSTRI TEKSTIL	Rp	5,641,116,673
70	JIPPI SOLUSITAMA INDONES	1290000112099	41011.B	KONSTRUKSI GEDUNG	Rp	1,000,000,000
71	JIPPI SOLUSITAMA INDONES	1290000112099	41012.B	KONSTRUKSI GEDUNG	Rp	1,000,000,000
72	JIPPI SOLUSITAMA INDONES	1290000112099	41013.B	KONSTRUKSI GEDUNG	Rp	1,000,000,000
73	JIPPI SOLUSITAMA INDONES	1290000112099	41016.B	KONSTRUKSI GEDUNG	Rp	1,000,000,000
74	JIPPI SOLUSITAMA INDONES	1290000112099	41019.B	KONSTRUKSI GEDUNG	Rp	1,000,000,000
75	JIPPI SOLUSITAMA INDONES	1290000112099	42111.B	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL	Rp	1,000,000,000
76	JIPPI SOLUSITAMA INDONES	1290000112099	43909.B	KONSTRUKSI KHUSUS	Rp	1,000,000,000
77	JIPPI SOLUSITAMA INDONES	1290000112099	46100	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	1,000,000,000
78	JIPPI SOLUSITAMA INDONES	1290000112099	68110.B	REAL ESTAT	Rp	1,000,000,000
79	KARYA SUMBER SUGIH	1229000140681	14111	INDUSTRI PAKAIAN JADI	Rp	50,000,000
80	KARYA SUMBER SUGIH	1229000140681	47711	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	50,000,000
81	KARYA SUMBER SUGIH	1229000140681	47712	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	50,000,000
82	KARYAWAN PT. CHITOSE INT	1285000111635	47111	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	48,402,765
83	KARYAWAN PT. CHITOSE INT	1285000111635	47112	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	28,402,765
84	KARYAWAN PT. CHITOSE INT	1285000111635	47192	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	28,402,765
85	KARYAWAN PT. CHITOSE INT	1285000111635	47611	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	28,402,765
86	KARYAWAN PT. CHITOSE INT	1285000111635	47920	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	22,358,893
87	KARYAWAN PT. CHITOSE INT	1285000111635	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK O	Rp	9,094,700
88	KARYAWAN PT. CHITOSE INT	1285000111635	81210	AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN	Rp	28,402,765
89	KEN JAYA ABADI	1281000141353	46900	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	10,000,000
90	KREASI BUMI ARKANANTA	1281000121088	47919	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	345,000,000
91	MADA KARYA	240010161133	46100	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	10,000,000
92	MANDIRI TEKNOLOGI PRATA	1245000121946	18111	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	Rp	175,000,000
93	MANDIRI TEKNOLOGI PRATA	1245000121946	18120	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	Rp	175,000,000
94	MANDIRI TEKNOLOGI PRATA	1245000121946	41011.B	KONSTRUKSI GEDUNG	Rp	175,000,000
95	MANDIRI TEKNOLOGI PRATA	1245000121946	41019.B	KONSTRUKSI GEDUNG	Rp	175,000,000
96	MANDIRI TEKNOLOGI PRATA	1245000121946	46900	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	175,000,000
97	MANDIRI TEKNOLOGI PRATA	1245000121946	70209	AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN	Rp	175,000,000
98	MANDIRI TEKNOLOGI PRATA	1245000121946	81100	AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN	Rp	175,000,000
99	PENDIDIKAN TELKOM	9120200872008	85132	PENDIDIKAN	Rp	6
100	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	41012.B	KONSTRUKSI GEDUNG	Rp	320,000,000
101	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	41019.B	KONSTRUKSI GEDUNG	Rp	320,000,000
102	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	43303.B	KONSTRUKSI KHUSUS	Rp	320,000,000
103	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	46100	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	320,000,000
104	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	46414	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	320,000,000
105	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	46419	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	320,000,000
106	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	46421	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	320,000,000
107	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	46422	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	320,000,000
108	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	46492	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	320,000,000
109	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	46492	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	320,000,000
110	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	46495	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	320,000,000
111	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	46511	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	320,000,000
112	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	46599	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	320,000,000
113	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	46692	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	320,000,000
114	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	46693	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	320,000,000
115	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	46696	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	320,000,000
116	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	46900	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	320,000,000
117	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	46339.B	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	320,000,000
118	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	46491.B	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	320,000,000
119	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	81210	AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN	Rp	320,000,000
120	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	81300	AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN	Rp	320,000,000
121	PRADIPTA BERKAH ABADI	1286000113807	82190	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KAN	Rp	320,000,000
122	SENDY TEKNIK	1255000120448	46100	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp	10,000,000
123	SILAGEN KARYA SAUDARA	1241000100294	41012.B	KONSTRUKSI GEDUNG	Rp	30,000,000
124	SILAGEN KARYA SAUDARA	1241000100294	41014.B	KONSTRUKSI GEDUNG	Rp	30,000,000
125	SILAGEN KARYA SAUDARA	1241000100294	41019.B	KONSTRUKSI GEDUNG	Rp	30,000,000
126	SILAGEN KARYA SAUDARA	1241000100294	42912.3	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL	Rp	30,000,000
127	SILAGEN KARYA SAUDARA	1241000100294	42111.B	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL	Rp	30,000,000
128	SILAGEN KARYA SAUDARA	1241000100294	42112.B	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL	Rp	30,000,000
129	SILAGEN KARYA SAUDARA	1241000100294	42113.B	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL	Rp	30,000,000
130	SILAGEN KARYA SAUDARA	1241000100294	42114.B	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL	Rp	30,000,000
131	SILAGEN KARYA SAUDARA	1241000100294	42115.B	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL	Rp	30,000,000
132	SILAGEN KARYA SAUDARA	1241000100294	42211.B	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL	Rp	30,000,000

10553	YUDHA KURNIAWAN	1509210050303	43215	KONSTRUKSI KHUSUS	Rp	3,000,000
10554	YUDHA KURNIAWAN	1509210050303	43214	KONSTRUKSI KHUSUS	Rp	3,000,000
10555	YUDHA KURNIAWAN	1509210050303	43305	KONSTRUKSI KHUSUS	Rp	4,000,000
10556	YUDI NUGRAHA	2309210010746	10710	INDUSTRI MAKANAN	Rp	20,000,000
10557	YUDI YANA	1712210023407	56104	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp	400,000
10558	YUDI YUDISTIRA	2009210031375	47919	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	10,000,000
10559	Yudiyanto	1312210004288	47919	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	10,000,000
10560	YUL TEGUH SANTOSO	1008210007736	56304	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp	750,000
10561	YULI AMBARWATI	1910210010754	47112	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	50,000,000
10562	YULI YULYANI	0510210004333	47249	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	50,000,000
10563	YULIA NIRMALA	1810210039924	68200	REAL ESTAT	Rp	150,000,000
10564	YULIA SAYUTI	0712210044064	47822	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	3,000,000
10565	YULIANA JAYATI	1510210005293	10792	INDUSTRI MAKANAN	Rp	20,000,000
10566	YULIANTI	2312210024146	10794	INDUSTRI MAKANAN	Rp	1,200,000
10567	YULIATI ENDAH KUSUMAWA	1610210004473	10750	INDUSTRI MAKANAN	Rp	2,000,000
10568	YULIAWATI	0608210038795	47112	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	500,000
10569	YULIYANTO SIDIQ	0411210005457	68111	REAL ESTAT	Rp	50,000,000
10570	YUMAN PERTAMANA	3010210014773	85440	PENDIDIKAN	Rp	20,000,000
10571	YUNDARIUS LESMANA	0278010231708	52101	PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN	Rp	150,000,000
10572	YUNITRI CHOERUNISA	1608210002307	28264	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL	Rp	2,500,000
10573	Yupi Yusuf Saluyu	1112210009745	47112	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	10,000,000
10574	YURI TRISTANDI	1711210011368	10750	INDUSTRI MAKANAN	Rp	3,000,000
10575	YURI TRISTANDI	1711210011368	47112	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	250,000,000
10576	YURISMAN BERNADIN	2812210022399	56290	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp	2,000,000
10577	Yusni Setiawan	1112210015378	61999	TELEKOMUNIKASI	Rp	10,000,000
10578	YUSUF	2809210041926	10750	INDUSTRI MAKANAN	Rp	5,000,000
10579	YUSUF SOBAR KUSWANDI	2909210022522	47301	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	50,000,000
10580	YUYUN	2312210022605	10794	INDUSTRI MAKANAN	Rp	200,000
10581	ZADIT MULIA PERKASA	0109210007952	47912	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	130,000,000
10582	ZADIT MULIA PERKASA	0109210007952	56109	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp	130,000,000
10583	ZAHRAH ATIKA ROHMAH	1610210009287	56102	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp	10,000,000
10584	ZAIDAN ADLI ISLAMI	2711210007593	47832	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	5,500,000
10585	ZAINAL MUSTOFA	2309210014717	47249	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	Rp	3,000,000
10586	ZENITA AISAH RAHMAYANTI	1312210034846	86105	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA	Rp	25,000,000
10587	ZILHAN AZHAR ARDIAN	1112210003037	14111	INDUSTRI PAKAIAN JADI	Rp	15,000,000
10588	ZULFA AULIA	0210210005173	10750	INDUSTRI MAKANAN	Rp	2,000,000
10589	ZULHELMY EFFENDI	1412210050834	56103	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp	50,000,000
			JUMLAH		Rp	3,729,108,280,634

Cimahi, 14 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DPMPTSP

Dra. HELLA HAERANI
NIP.196602141992022001

Lampiran Surat Keterangan
No. : 503/ 088 /I/DPMPTSP/2022
Tanggal: 14 Januari 2022

REKAPITULASI PENERBITAN IZIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
TAHUN 2021

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	3
2	Izin Penyelenggaraan Reklame	150
3	Keterangan Rencana Kota	253
4	Izin Pembukaan Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu / Kantor	0
5	Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	0
6	Petikan Izin Usaha Angkutan	22
7	Izin Trayek	21
8	Kartu Pengawasan Izin Trayek	48
9	Kartu Pengawasan Izin Operasi Tidak dalam Trayek	1
10	Surat Izin Tempat Usaha	0
11	Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT	0
12	Izin Praktik Dokter Hewan	2
13	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan	0
14	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing	0
15	Surat Izin Praktik Apoteker	79
16	Surat Izin Praktik Dokter	295
17	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	36
18	Surat Izin Praktik Perawat	375
19	Surat Izin Praktik Bidan	57
20	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	21
21	Surat Izin Praktik Analis	3
22	Surat Izin Praktik Fisioterapis	16
23	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	11
24	Surat Izin Praktik Penyehat Tradisional	1
25	Surat Izin Praktik Radiografer	10
26	Surat Izin Praktik Perekam Medis	11
27	Surat Izin Praktik Refra Ksionis Optisien	1
28	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis	1
29	Surat Izin Praktik Perawat Anestesi	0
30	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian	6
31	Surat Izin Praktik Terapis Gigi	4
32	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis	0
33	Sertifikasi Prouk Pangan	38
34	Izin Prinsip	183
35	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	16
36	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	215
37	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	56
38	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	25
39	Tanda Daftar Gudang (TDG)	7
40	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	22
41	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	4
42	Izin Usaha Industri (IUI)	2
43	Izin Pembuangan Air Limbah	6
44	Izin Penyimpanan Limbah B3	4
45	Kartu Pengawasan Izin Pengusaha Air Tanah	39
46	Izin Mendirikan Klinik (Pratama dan Utama)	2

47	Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama)	3
48	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D	2
49	Izin Toko Obat	2
50	Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Uap	11
51	Izin Penggunaan dan Pengawasan Instalasi Listrik	3
52	Izin Pendirian Sekolah Swasta	4
TOTAL		**2071**

Sumber : DPMPTSP per 31 Desember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Cimahi

Dra. HELLA HAERANI
NIP.196602141992022001

Certificate of Registration

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lantai I, Jl. Raden Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia

Operate a management system that complies with the requirements of

ISO 9001:2015

With the scope:

Provision of Integrated Permit Services

EA Code: 36

Certificate No. QS 5858

Originally Registered:	06th March 2012
Registered by WQA:	06th March 2012
Re-Certification:	15th December 2022
Latest Issue:	15th December 2021

Signed on behalf of WQA

Validity of this certificate can be checked by contacting:
Worldwide Quality Assurance Ltd
Severn House,
Mandale Business Park,
Durham,
DH1 1TH
www.worldwideqa.com

This certificate remains the property of Worldwide Quality Assurance Ltd and must be returned on request.

WORLDWIDE QUALITY ASSURANCE

Certificate

of

ACHIEVEMENT

This is to certify that

Tina Restiana, S.T

has successfully completed a course of

Service Excellence

Worldwide Quality Assurance – Asia Pacific

Cimahi, 10th December 2021

Signed on behalf of WQA-APAC

TR 21 0118
CERTIFICATE NUMBER

WQA

www.wqa-apac.com
Hotline: 08111496821

AN AFFILIATE OF WORLDWIDE QUALITY ASSURANCE LTD (UK)

REKAPITULASI NILAI KINERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PER BULAN JANUARI 2021

	NILAI REALISASI FISIK				
	Nilai Target Fisik	Realisasi Fisik	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
A	2.2	1.24	56.36363636	3	

	NILAI REALISASI KEUANGAN				
	Nilai Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
B	2.2	1.24	56.36363636	3	

NILAI KINERJA ORGANISASI :	Nilai(A)		Nilai(B)		
		+ 2			
56.3636363636364%	3	+ 2	3	=	3
					CUKUP
PERSENTASE TKD TERHADAP NILAI KINERJA ORGANISASI (20%) :					0.60

REKAPITULASI NILAI KINERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PER BULAN FEBRUARI 2021

	NILAI REALISASI FISIK				
	Nilai Target Fisik	Realisasi Fisik	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
A	4.9	4.16	84.89795918	5	

	NILAI REALISASI KEUANGAN				
	Nilai Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
B	4.78	2.65	55.43933054	3	

NILAI KINERJA ORGANISASI :	Nilai(A)	+	Nilai(B)		-	
		2				
70.1686448638033%	5	+	3	=	4	
		2			BAIK	

PERSENTASE TKD TERHADAP NILAI KINERJA ORGANISASI (20%) : **0.80**

REKAPITULASI NILAI KINERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PER BULAN MARET 2021

	NILAI REALISASI FISIK				
	Nilai Target Fisik	Realisasi Fisik	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
A	8.67	6.54	75.43252595	4	

	NILAI REALISASI KEUANGAN				
	Nilai Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
B	8.54	4.48	52.45901639	3	

NILAI KINERJA ORGANISASI :	Nilai(A)	+	Nilai(B)			
		2				
63.9457711724999%	4	+	3	=	3.5	
		2			BAIK	
PERSENTASE TKD TERHADAP NILAI KINERJA ORGANISASI (20%) :					0.70	

REKAPITULASI NILAI KINERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PER BULAN APRIL 2021

	NILAI REALISASI FISIK				
	Nilai Target Fisik	Realisasi Fisik	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
A	10.79	10.71	99.25857275	5	

	NILAI REALISASI KEUANGAN				
	Nilai Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
B	10.72	6.92	64.55223881	4	

NILAI KINERJA ORGANISASI :	Nilai(A)	+	Nilai(B)		
		2			
81.9054057792594%	5	+	4	=	4.5
		2			SANGAT BAIK

PERSENTASE TKD TERHADAP NILAI KINERJA ORGANISASI (20%) : **0.90**

REKAPITULASI NILAI KINERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PER BULAN MEI 2021

	NILAI REALISASI FISIK				
	Nilai Target Fisik	Realisasi Fisik	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
A	14.05	11.66	82.98932384	5	

	NILAI REALISASI KEUANGAN				
	Nilai Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
B	14.09	8.81	62.52661462	4	

NILAI KINERJA ORGANISASI :	Nilai(A)	+	Nilai(B)			
		2				
72.7579692318572%	5	+	4	=	4.5	
		2			SANGAT BAIK	
PERSENTASE TKD TERHADAP NILAI KINERJA ORGANISASI (20%) :					0.90	

REKAPITULASI NILAI KINERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PER BULAN JULI 2021

	NILAI REALISASI FISIK				
	Nilai Target Fisik	Realisasi Fisik	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
A	21.01	16.27	77.43931461	4	

	NILAI REALISASI KEUANGAN				
	Nilai Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
B	45.42	12.73	28.02730075	2	

NILAI KINERJA ORGANISASI :	Nilai(A)	+	Nilai(B)			
		2				
52.7333076803292%	4	+	2	=	3	
		2			CUKUP	
PERSENTASE TKD TERHADAP NILAI KINERJA ORGANISASI (20%) :					0.60	

REKAPITULASI NILAI KINERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PER BULAN AGUSTUS 2021

	NILAI REALISASI FISIK				
	Nilai Target Fisik	Realisasi Fisik	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
A	23.6	18.52	78.47457627	4	

	NILAI REALISASI KEUANGAN				
	Nilai Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
B	48.26	14.57	30.19063407	2	

NILAI KINERJA ORGANISASI :	Nilai(A)		Nilai(B)		
		+ 2			
54.3326051683325%	4	+ 2	2	=	3
					CUKUP
PERSENTASE TKD TERHADAP NILAI KINERJA ORGANISASI (20%) :					0.60

REKAPITULASI NILAI KINERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PER BULAN SEPTEMBER 2021

	NILAI REALISASI FISIK				
	Nilai Target Fisik	Realisasi Fisik	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
A	31.24	20.67	66.16517286	4	

	NILAI REALISASI KEUANGAN				
	Nilai Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
B	69.08	16.41	23.75506659	2	

NILAI KINERJA ORGANISASI :	Nilai(A)	+	Nilai(B)			
		2				
44.9601197223876%	4	+	2	=	3	
		2			CUKUP	
PERSENTASE TKD TERHADAP NILAI KINERJA ORGANISASI (20%) :					0.60	

REKAPITULASI NILAI KINERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PER BULAN OKTOBER 2021

	NILAI REALISASI FISIK				
	Nilai Target Fisik	Realisasi Fisik	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
A	52.53	23.45	44.64115743	3	

	NILAI REALISASI KEUANGAN				
	Nilai Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
B	73.84	18.11	24.52600217	2	

NILAI KINERJA ORGANISASI :	Nilai(A)	+	Nilai(B)		
		2			
34.5835798003473%	3	+	2	=	2.5
		2			CUKUP
PERSENTASE TKD TERHADAP NILAI KINERJA ORGANISASI (20%) :					0.50

REKAPITULASI NILAI KINERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PER BULAN NOVEMBER 2021

	NILAI REALISASI FISIK				
	Nilai Target Fisik	Realisasi Fisik	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
A	62.64	39.1	62.4201788	4	

	NILAI REALISASI KEUANGAN				
	Nilai Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
B	76.24	29.24	38.35257083	2	

NILAI KINERJA ORGANISASI :	Nilai(A)	+	Nilai(B)		
		2			
50.3863748142252%	4	+	2	=	3
		2			CUKUP
PERSENTASE TKD TERHADAP NILAI KINERJA ORGANISASI (20%) :					0.60

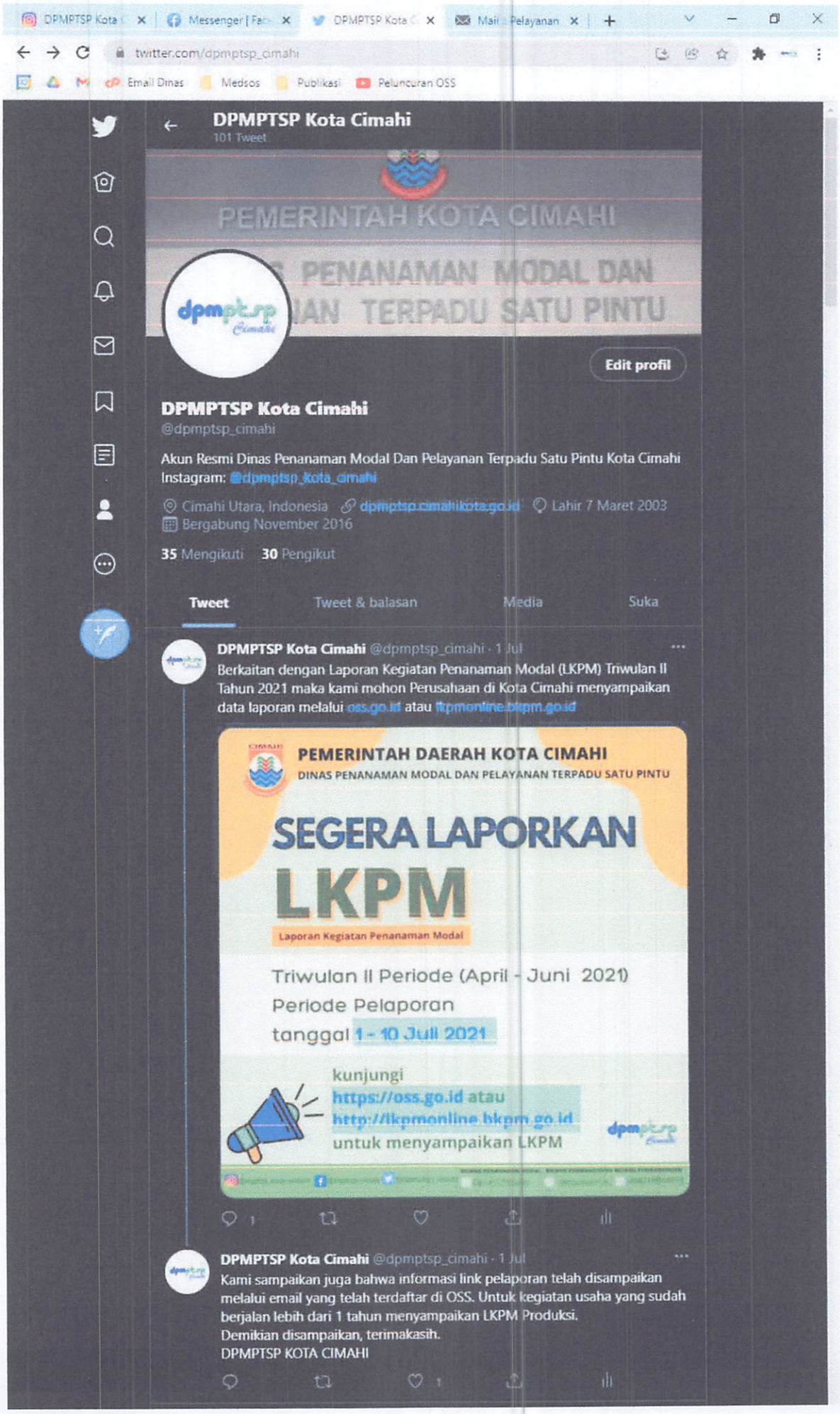
REKAPITULASI NILAI KINERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PER BULAN DESEMBER 2021

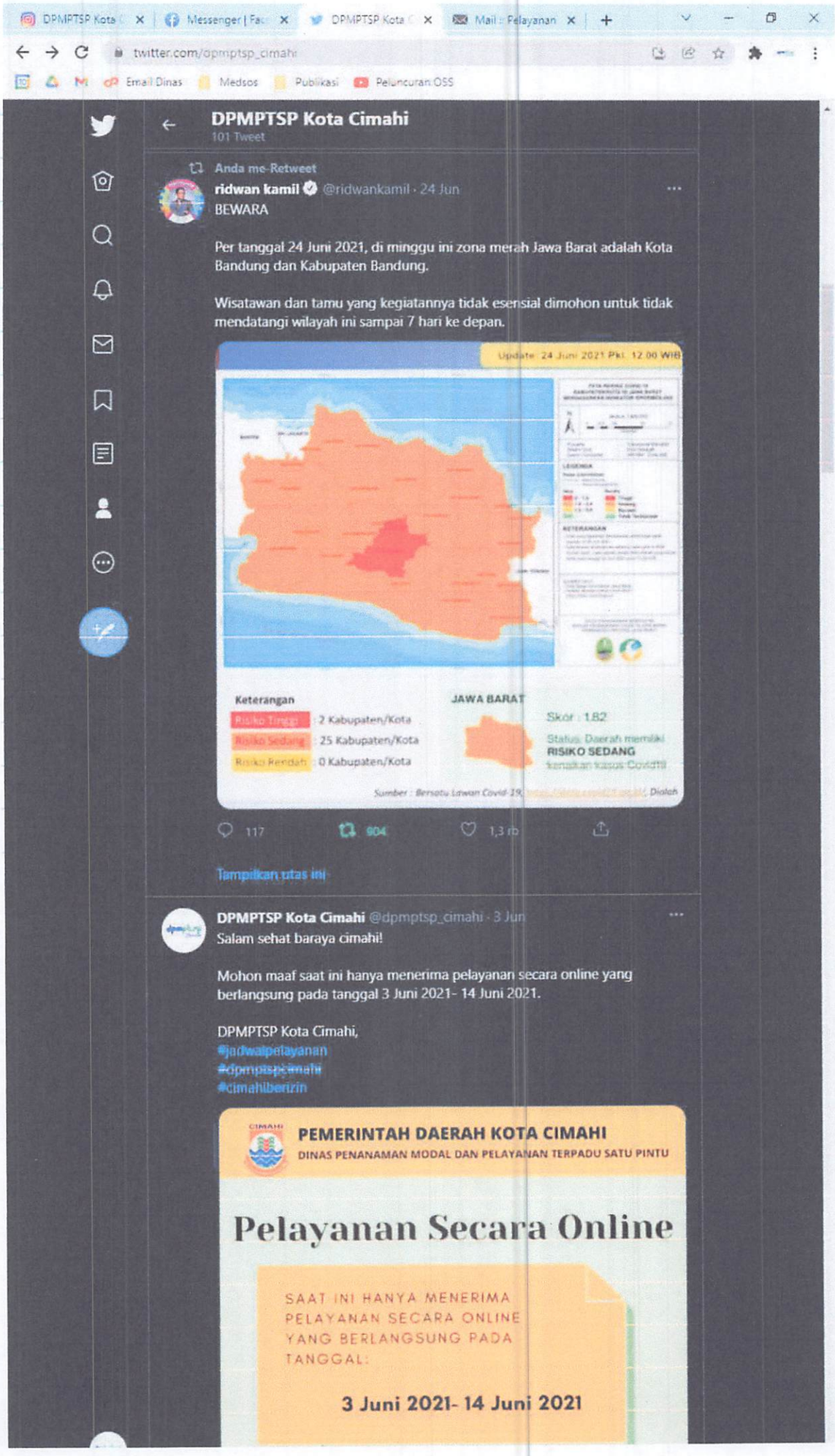
	NILAI REALISASI FISIK				
	Nilai Target Fisik	Realisasi Fisik	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
A	100	95.57	95.57	5	

	NILAI REALISASI KEUANGAN				
	Nilai Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Persentase %	Nilai Skala (1-5)	Keterangan
B	100	75.24	75.24	4	

NILAI KINERJA ORGANISASI :	Nilai(A)		Nilai(B)		
		+ 2			
85.405%	5	+ 2	4	=	4.5
					SANGAT BAIK

PERSENTASE TKD TERHADAP NILAI KINERJA ORGANISASI (20%) : **0.90**


DPMPTSP Kota Cimahi
101 Tweet
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
PENANAMAN MODAL DAN
TERPADU SATU PINTU
Edit profil
DPMPTSP Kota Cimahi
@dpmptsp_cimahi
Akun Resmi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi
Instagram: @dpmptsp_kota_cimahi
Cimahi Utara, Indonesia
dpmptsp.cimahikota.go.id
Lahir 7 Maret 2003
Bergabung November 2016
35 Mengikuti
30 Pengikut
Tweet
Tweet & balasan
Media
Suka
DPMPTSP Kota Cimahi @dpmptsp_cimahi · 1 Jul
Berkaitan dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan II Tahun 2021 maka kami mohon Perusahaan di Kota Cimahi menyampaikan data laporan melalui oss.go.id atau lkpmonline.bkpm.go.id
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEGERA LAPORKAN
LKPM
Laporan Kegiatan Penanaman Modal
Triwulan II Periode (April - Juni 2021)
Periode Pelaporan
tanggal 1 - 10 Juli 2021
kunjungi
https://oss.go.id atau
http://lkpmonline.bkpm.go.id
untuk menyampaikan LKPM
DPMPTSP Kota Cimahi @dpmptsp_cimahi · 1 Jul
Kami sampaikan juga bahwa informasi link pelaporan telah disampaikan melalui email yang telah terdaftar di OSS. Untuk kegiatan usaha yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun menyampaikan LKPM Produksi.
Demikian disampaikan, terimakasih.
DPMPTSP KOTA CIMAHI


DPMPTSP Kota Cimahi
101 Tweet
Anda me-Retweet
ridwan kamil @ridwankamil · 24 Jun
BEWARA
Per tanggal 24 Juni 2021, di minggu ini zona merah Jawa Barat adalah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.
Wisatawan dan tamu yang kegiatannya tidak esensial dimohon untuk tidak mendatangi wilayah ini sampai 7 hari ke depan.
Keterangan
Risiko Tinggi : 2 Kabupaten/Kota
Risiko Sedang : 25 Kabupaten/Kota
Risiko Rendah : 0 Kabupaten/Kota
JAWA BARAT
Skor : 1.82
RISIKO SEDANG
117
904
1,3 rb
Tampilkan utas ini
DPMPTSP Kota Cimahi @dpmptsp_cimahi · 3 Jun
Salam sehat baraya cimahi!
Mohon maaf saat ini hanya menerima pelayanan secara online yang berlangsung pada tanggal 3 Juni 2021- 14 Juni 2021.
DPMPTSP Kota Cimahi,
#jadwalpelayanan
#dpmptspcimahi
#cimahiberizin
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pelayanan Secara Online
SAAT INI HANYA MENERIMA PELAYANAN SECARA ONLINE YANG BERLANGSUNG PADA TANGGAL:
3 Juni 2021- 14 Juni 2021

Mail :: Assalamualaikum, Selamat Malam dan salam Sejahtera... - Google Chrome

webmail.cimahikota.go.id/cpsess2538500027/horde/imp/dynamic.php?page=message&buid=5&mailbox=SU5CT1guUGVsYXlhbmFu&token=nRrcVpD3k3tjWG7UDOooHD3&uniq=1639129303267

Reply | Forward | Delete

View Source
Save
View All Parts

Assalamualaikum, Selamat Malam dan salam Sejahtera...

Date: Monday, 06 December 2021 (18:35 WIB)
From: yani kallista
To: dpmptsp@cimahikota.go.id

Attachments: foto member si pinter.jpg (62 KB)

You replied to this message on Wednesday, 08 December 2021 08:48.

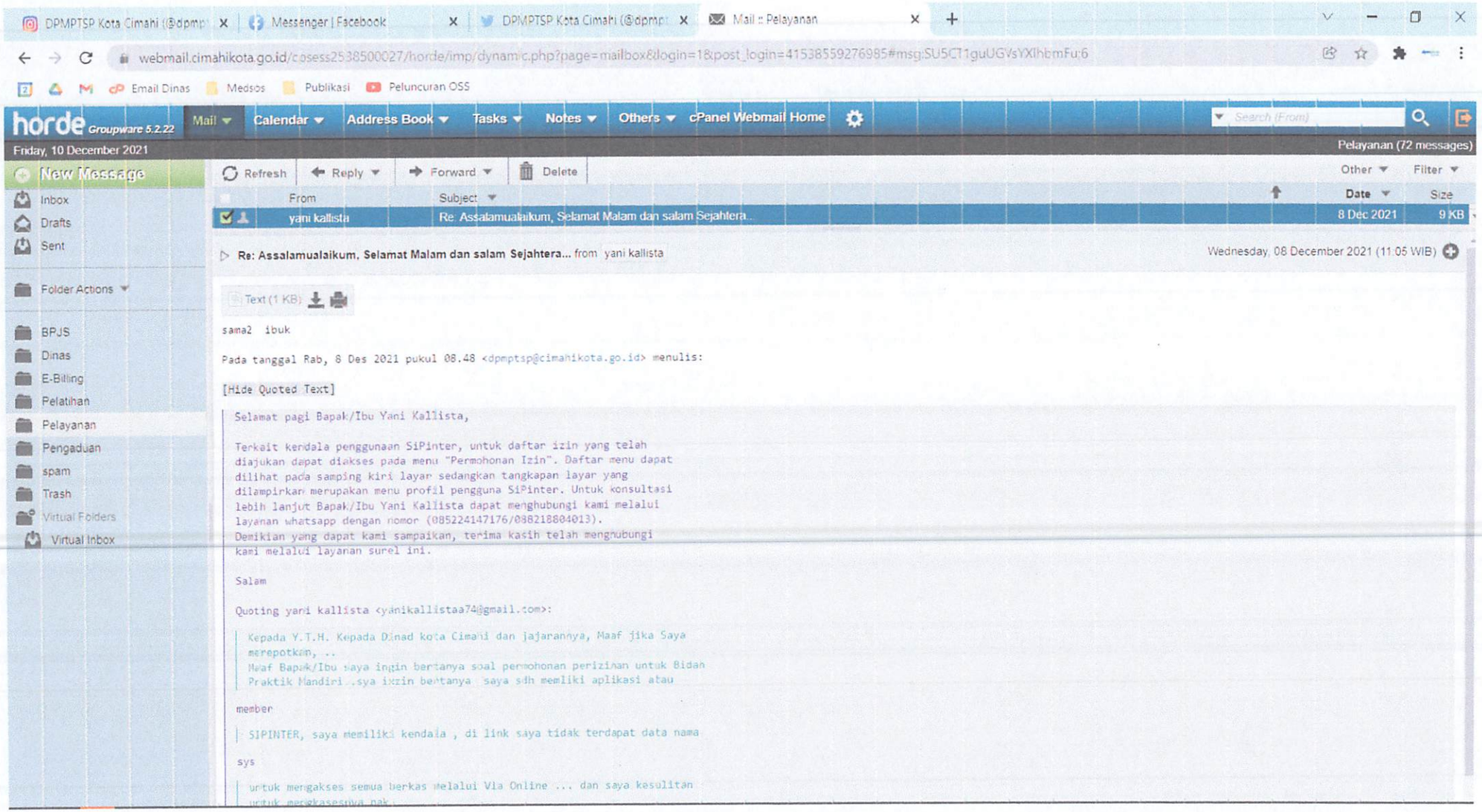
Text (1 KB)

Kepada Y.T.H. Kepada Dinad kota Cimahi dan jajarannya, Maaf jika Saya merepotkan, ..
Maaf Bapak/Ibu saya ingin bertanya soal permohonan perizinan untuk Bidan Praktik Mandiri..sya ixzin bertanya saya sdh memliki aplikasi atau member SIPINTER, saya memiliki kendala , di link saya tidak terdapat data nama sys untuk mengakses semua berkas melalui Via Online ... dan saya kesulitan untuk mengkasesnya pak

Demikian permohonan saya sampaikan, agar dapat di makhlumi pak.
Terima kasih saya ucapkan dan Mohon Maaf yang sebsar besarnya🙏

foto member si pinter.jpg (62 KB)

This is a thumbnail of an image attachment.
View Attachment


DPMPTSP Kota Cimahi (@dpmp
Messenger | Facebook
DPMPTSP Kota Cimahi (@dpmp
Mail :: Pelayanan
webmail.cimahikota.go.id/cosess2538500027/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox&login=1&post_login=4153855927698S#msg:SU5CT1guUGVsYXlhbmFu:6
Email Dinas
Medsos
Publikasi
Peluncuran OSS
horde Groupware 5.2.22
Mail
Calendar
Address Book
Tasks
Notes
Others
cPanel Webmail Home
Search (From)
Friday, 10 December 2021
Pelayanan (72 messages)
New Message
Refresh
Reply
Forward
Delete
Other
Filter
Inbox
Drafts
Sent
From
Subject
Date
Size
yani kallista
Re: Assalamualaikum, Selamat Malam dan salam Sejahtera...
8 Dec 2021
9 KB
Folder Actions
Re: Assalamualaikum, Selamat Malam dan salam Sejahtera... from yani kallista
Wednesday, 08 December 2021 (11:05 WIB)
BPJS
Dinas
E-Billing
Pelatihan
Pelayanan
Pengaduan
spam
Trash
Virtual Folders
Virtual Inbox
Text (1 KB)
sama2 ibuk
Pada tanggal Rab, 8 Des 2021 pukul 08.48 <dpmptsp@cimahikota.go.id> menulis:
[Hide Quoted Text]
Selamat pagi Bapak/Ibu Yani Kallista,
Terkait kendala penggunaan SiPinter, untuk daftar izin yang telah diajukan dapat diakses pada menu "Permohonan Izin". Daftar menu dapat dilihat pada samping kiri layar sedangkan tangkapan layar yang dilampirkan merupakan menu profil pengguna SiPinter. Untuk konsultasi lebih lanjut Bapak/Ibu Yani Kallista dapat menghubungi kami melalui layanan whatsapp dengan nomor (085224147176/088218804013).
Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih telah menghubungi kami melalui layanan surel ini.
Salam
Quoting yani kallista <yanikallistaa74@gmail.com>:
Kepada Y.T.H. Kepada Dinad kota Cimahi dan jajarannya, Maaf jika Saya merepotkan, ..
Maaf Bapak/Ibu saya ingin bertanya soal permohonan perizinan untuk Bidan Praktik Mandiri..sya ixzin bertanya saya sdh memliki aplikasi atau
member
SIPINTER, saya memiliki kendala , di link saya tidak terdapat data nama
sys
untuk mengakses semua berkas melalui Via Online ... dan saya kesulitan
untuk mengkasesnya pak..

Search

Fitriana A

January 13, 2021 9:55 am

Assalamualaikum maaf mengganggu mau bertanya , saya pengajuan sip dokter dengan resi 0020121390 bagaimana ya ? Karena sudah 14 hari kerja , saya sudah masukan berkas sejak tgl 18 desember, tapi sampai saat ini masih belum mendapat kabar selesai, saat saya cek berkala di website statusnya masih rekomendasi dinkes, apakah ada data yang kurang atau bagaimana ? Saya sudah wa sejak kemarin namun masih belum ada balasan, saya coba telfon tidak ada yg mengangkat dan tadi pagi saya coba sms tapi masih belum ada balasan, Maaf tolong arahannya karena sudah lama, terima kasih sebelumnya

January 13, 2021 12:03 pm

Waalaikumusalam, selamat siang salam sehat. Kami bantu untuk tracking berkas dengan nomor resi 0020121390, mohon ditunggu.

Permohonan SIP. Dokter dengan no resi 0020121390 a.n Fitriana Andiani berdasarkan status tracking di sistem kami berkas masih diproses oleh Dinas Kesehatan. Mohon maaf atas keterlambatan proses penyelesaiannya. Terimakasih.

January 13, 2021 1:50 pm

Maaf kira kira berapa lama lagi ya ? Apa saya perlu ke dinkes untuk menanyakan ? Terima kasih sebelumnya

January 14, 2021 10:10 am

Mohon maaf atas keterlambatan penyelesaian Perizinan SIP Dokter, kami bantu koordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Mohon ditunggu saja, akan kami hubungi jika SIP Dokter telah selesai. 🙏

Mudah mudahan bisa cepat ya ka , terima kasih banyak 🙏

January 22, 2021 8:42 am

Siti Maryam

February 23, 2021 9:27 pm

Selamat malam, maaf saya mau nnya. Gini tahun 2017 saya ikut praktek di klinik Permana bareng sama dokter, nah tahun 2019 bulan November saya keluar, tapi plang nama saya masih terpasang di depan klinik. kalau saya mau tarik berkas saya bisa gk?

February 24, 2021 9:03 am

Selamat pagi.

Silahkan, Surat izin praktek nya diajukan untuk dicabut ke dinas kesehatan cimahi.

Terimakasih 🙏

Jdi saya tinggal datang ke Dinkes Cimahi aja yah?

Betul, langsung datang ke dinkes saja.

Owhh iya, terima kasih info nya 🙏

ok baik terimakasih🙏

Iyaa dengan senang hati 🙏

April 6, 2021 8:56 am

selamat pagi, mau follow up permohonan SIPA ini



Selamat pagi, kalau dilihat disistem masih menunggu rekomendasi dari Dinkes. Mohon untuk ditunggu saja ya. Terimakasih 🙏

oh iya krn sudah 12 hari kerja🙏 baik tks

April 6, 2021 12:33 pm

Iya sama samq 🙏

April 13, 2021 6:10 am

selamat pagi, jika status sudah selesai, pengambilan dokumen bs lsg dtg ke dpmptsp membawa resi?

April 13, 2021 7:56 am

Selamat pagi,
Iya bisa langsung diambil langsung ke DPMPTSP Kota Cimahi. Jadwal pelayanan hari senin-kamis dr jam 8:00-12:00 WIB, jumat dr jam 8:00-11:00. Terimakasih🙏

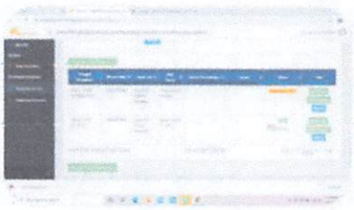
sambil membawa resi dan berkas persyaratannya ya?

Iya betul 🙏

terimakasih yaaa🙏

Amyra

March 22, 2021 11:41 am



selamat siang, sy mengajukan Surat Izin Praktik Apoteker dan sudah terproses seperti ini. maaf ingin bertanya, selanjutnya prosesnya seperti apa ya? apakah dokumen bisa lsg diambil atau seperti apa?

terimakasih

March 22, 2021 4:03 pm

Selamat sore,
Untuk proses mengajukan Surat Izin Praktik Apoteker tersebut sedang diproses oleh Dinas Kesehatan, apabila proses sudah selesai, statusnya "selesai".
Waktu penyelesaian maksimal 14 hari kerja terhitung dari tanggal pengajuan. Ditunggu saja ya.
Terimakasih

ok baik terimakasih🙏

Iyaa dengan senang hati 🙏

April 6, 2021 8:56 am

selamat pagi, mau follow up permohonan SIPA ini



Selamat pagi, kalau dilihat disistem masih menunggu rekomendasi dari Dinkes.
Mohon untuk ditunggu saja ya.
Terimakasih 🙏

oh iya krn sudah 12 hari kerja🙏
baik tks

April 6, 2021 12:33 pm

Iya sama samq 🙏

DPMPTSP Kota Cimahi (@dpmp | Friends | Facebook | https://twitter.com/home | Mail :: Pelayanan

instagram.com/dpmptsp_kota_cimahi/

Email Dinas | Medsos | Publikasi | Peluncuran OSS

Instagram

Search













ENG 16:29

DPMPTSP Kota Cimahi (@dpmpt | Friends | Facebook | https://twitter.com/home | Mail :: Pelayanan

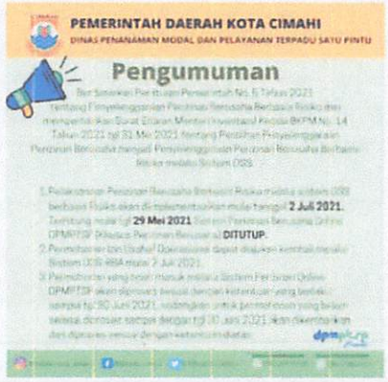
instagram.com/dpmptsp_kota_cimahi/

Email Dinas | Medsos | Publikasi | Peluncuran OSS

Instagram













ENG 16:30

P E SDUK | 081221700800



STATISTIK PESAN SARAN



+62858633xxx 01 Dec 2021 20:55:02

kalo bikin IMB/PBG dari daftar online itu beresnya berapa lama?



ENCI KURNIADI, AKS
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
03 Dec 2021 11:06:04

Yth. Bapak/Ibu Untuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan sesuai fungsi dan kompleksitas persyaratan bangunan gedung melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) berdasarkan PP Nomor 16 tahun 2021. Lebih lanjut, pemohon dapat melakukan konsultasi informasi pendaftaran kepada kami (DPMPTSP) dan pemeriksaan pemenuhan standar teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi bertempat di Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada hari dan jam kerja. Demikian , terima kasih atas perhatianya

+62 856-2420-54...

Selamat pagi

Saya Naeliati dari PT. Sumber Tanusha

Pak/Bu saya mau bertanya dan konsultasi

Sekitar beberapa hari lalu kami sudah melakukan pengurusan NIB, Izin usaha, dan izin komersil melalui layanan web OSS

Kami mengalami kendala pada bagian IMB SLF.
IMB kami sudah ada.. apakah perlu mengurus SLF jg? Dikarenakan aktualnya fasilitas kami sudah berdiri lama dan sudah aktif di lama

Selamat pagi

Terkait dengan OSS silahkan konsultasi pada bidang perekonomian

Kirim pesan

+62 856-2420-54...

Bidang Perekonomian

Kirim pesan

Lihat lainnya

Kirim pesan

+62 856-2420-54...

Oke baik pak.. terimakasih

Untuk SLF bisa konsultasi pada Dinas PUPR Kota Cimahi Gedung C lantai 2

SPPinter - DPMPTSP Kota Cimahi

Semua persyaratan dan formulir untuk setiap tahapan yang di lakukan di DPMPTSP Kota Cimahi dapat di unduh di website:

https://dpmptsp.cimahikota.go.id/

Kirim pesan

+62 856-2420-54...

Semua persyaratan dan formulir untuk setiap tahapan yang di lakukan di DPMPTSP Kota Cimahi dapat di unduh di website:

https://dpmptsp.cimahikota.go.id/

Silahkan coba akses link diatas

Untuk dapat melakukan permohonan perizinan melalui SPPinter pemohon terlebih dahulu wajib memiliki akun. Jika belum memiliki akun silahkan klik tombol daftar sekarang

Dikarenakan ada pembaharuan sistem Jika pemohon sudah memiliki akun, silahkan lakukan registrasi ulang dengan cara reset password dengan memilih tombol "lupa password" ikuti langkah selanjutnya sesuai arahan

Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih

Kirim pesan

+62 856-2420-54...

Kirim pesan

+62 856-2420-54...

Oke baik pak.. terimakasih banyak

Terima kasih kembali

18 Januari 2021

Selamat sore pak

Apakah saya bisa berkonsultasi mengenai persyaratan SLF pak?

Mohon arahannya
Terimakasih pak

20 Januari 2021

Untuk konsultasi terkait dengan SLF bisa konsultasi pada DPUPR Kota Cimahi Gedung C Lantai 2

Anda
Untuk konsultasi terkait dengan SLF bisa konsultasi pada DPUPR Kota Cimahi

Kirim pesan

+62 856-2420-54...

Via wa atau tlp bisa pak? Atau harus datang?

+62 856-2420-5447
Via wa atau tlp bisa pak? Atau harus datang?

Layanan ini hanya chat

Silahkan datang langsung ke DPUPR Kota Cimahi, Gedung C lantai 2

Anda
Silahkan datang langsung ke DPUPR Kota Cimahi, Gedung C lantai 2

Oke baik pak

Terimakasih infonya

Kirim pesan

+62 813-9573-52...

Assalamualaikum, siang bapak/ibu. saya mau bertanya untuk persyaratan membuat IMB apa saja?

20 Januari 2021

Waalikumsalam

SPPinter - DPMPTSP Kota Cimahi

Untuk membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ada 2 tahapan untuk lokasi yang diluar KBU, dan 4 Tahapan bagi yang berlokasi di KBU.

1. Permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) (di DPMPTSP Kota Cimahi)
2. Rekomendasi KRK (di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat) Form + Persyaratan di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
3. Permohonan Pengesahan Gambar Konstruksi (di DPMPTSP Kota

Kirim pesan

+62 813-9573-52...

3. Permohonan Pengesahan Gambar Konstruksi (di DPMPTSP Kota Cimahi)
4. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (di DPMPTSP Kota Cimahi)

Catatan: Sebelum masuk ke tahap Permohonan IMB
pada persyaratan IMB ada beberapa rekomendasi yang harus dipenuhi antara lain :
1) Rekomendasi Lingkungan Hidup (Persyaratan ada di website).
2) Rekomendasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran (jika di perlukan) Form + Persyaratan di Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi.
3) Rekomendasi Andalalin (jika di perlukan) Form + Persyaratan di DISHUB Kota Cimahi.

Semua persyaratan dan formulir untuk setiap tahapan yang di lakukan di DPMPTSP Kota Cimahi dapat di

Kirim pesan

+62 813-9573-52

https://dpmptsp.cimahikota.go.id/member/login

Silahkan coba akses link diatas

Untuk dapat melakukan permohonan perizinan melalui SiPinter pemohon terlebih dahulu wajib memiliki akun Jika belum memiliki akun silahkan klik tombol daftar sekarang

Dikarenakan ada pembaharuan sistem Jika pemohon sudah memiliki akun, silahkan lakukan registrasi ulang dengan cara reset password dengan memilih tombol "lupa password" ikuti langkah selanjutnya sesuai arahan.

Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

Kirim pesan

+62 813-9573-52

Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

Unduh di sini

Kirim pesan

+62 811-2390-118

minta info imb

20 Januari 2021

SiPinter - DPMPTSP Kota Cimahi

Untuk membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ada 3 tahapan untuk lokasi yang dikuar KBU, dan 4 Tahapan bagi yang berlokasi di KBU

1. Permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) (di DPMPTSP Kota Cimahi)
2. Rekomendasi KBU (di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat) Form + Persyaratan di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
3. Permohonan Pengesahan Gambar Konstruksi (di DPMPTSP Kota Cimahi)
4. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (di DPMPTSP Kota

Kirim pesan

+62 811-2390-118

4. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (di DPMPTSP Kota Cimahi)

Catatan: Sebelum masuk ke tahap Permohonan IMB pada persyaratan IMB ada beberapa rekomendasi yang harus dipenuhi antara lain :
1) Rekomendasi Lingkungan Hidup (Persyaratan ada di website);
2) Rekomendasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran (jika di perlukan) Form + Persyaratan di Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi;
3) Rekomendasi Andalalin (jika di perlukan) Form + Persyaratan di DISHUB Kota Cimahi

Semua persyaratan dan formulir untuk setiap tahapan yang di laksakan di DPMPTSP Kota Cimahi dapat di unduh di website

https://dpmptsp.cimahikota.go.id/member/login

Kirim pesan

+62 811-2390-118

https://dpmptsp.cimahikota.go.id/member/login

Silahkan coba akses link diatas

Untuk dapat melakukan permohonan perizinan melalui SiPinter pemohon terlebih dahulu wajib memiliki akun Jika belum memiliki akun silahkan klik tombol daftar sekarang

Dikarenakan ada pembaharuan sistem Jika pemohon sudah memiliki akun, silahkan lakukan registrasi ulang dengan cara reset password dengan memilih tombol "lupa password" ikuti langkah selanjutnya sesuai arahan.

Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

Kirim pesan

+62 811-2390-118

Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

Unduh di sini

Kirim pesan

+62 852-2277-31...

Hapunten pak..
Abdi nuju ngadamel IMB

Nitip deui abdi teh ngintun scan nan kemarin nya

Hatur nuhun..

Selamat pagi

permohonan atas nama siapa

status pada sipinter bagaimana?

boleh fotokan resinya

Anita
permohonan atas nama siapa

Mesjid Siti chodidjah

SiPinter - DPMPTSP Kota Cimahi

Kirim pesan

+62 852-2277-31...

Semua [illegible] formulir untuk setiap tahapan yang di laksakan di DPMPTSP Kota Cimahi dapat di unduh di website

https://dpmptsp.cimahikota.go.id/member/login

Silahkan coba akses link diatas

Untuk dapat melakukan permohonan perizinan melalui SiPinter pemohon terlebih dahulu wajib memiliki akun Jika belum memiliki akun silahkan klik tombol daftar sekarang

Dikarenakan ada pembaharuan sistem Jika pemohon sudah memiliki akun, silahkan lakukan registrasi ulang dengan cara reset password dengan memilih tombol "lupa password" ikuti langkah selanjutnya sesuai arahan.

Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

Kirim pesan

+62 852-2277-31...

klik tombol daftar sekarang

Dikarenakan ada pembaharuan sistem Jika pemohon sudah memiliki akun, silahkan lakukan registrasi ulang dengan cara reset password dengan memilih tombol "lupa password" ikuti langkah selanjutnya sesuai arahan.

Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

Kirim pesan

+62 812-9294-09...

Selamat siang,
Utk pelayanan informasi perizinan reklame apakah bisa lwt no WA ini?
Terima kasih.

Selamat pagi

Terkait dengan reklame apa?

Permanen ataukan Non Permanen?

Jenis papan/billboard

Itu termatuk non atau permanen ya pak/bu?

Boleh fotokan bentuknya?

+62 812-9294-0919

PERMANEN

Ketik pesan

+62 812-9294-09...





Kirim pesan

+62 812-9294-09...

Kmrn sempat tim saya ke bapoenda cimahi pak, lalu muncul tagihan pajak utk reklame, dan tnyta ketika pemasangan reklame ini blm ada izin nya

Kmrn sudah diberi berkas utk pemgurusan izin dan katanya bisa online



Utk izin reklame di alamat dpmptsp atau oss pak?

Lalu persyaratan apa saja yg hrs terlampir, agar kami siapkan trlebih dahulu

Kirim pesan

+62 812-9294-09...

Kmrn sempat tim saya ke bapoenda cimahi pak, lalu muncul tagihan pajak utk reklame, dan tnyta ketika pemasangan reklame ini blm ada izin nya

Kmrn sudah diberi berkas utk pemgurusan izin dan katanya bisa online



Utk izin reklame di alamat dpmptsp atau oss pak?

Lalu persyaratan apa saja yg hrs terlampir, agar kami siapkan trlebih dahulu

Kirim pesan

+62 812-9294-09...

+62 812-9294-0919

Billboard permanen

+62 812-9294-0919

Papan Merek Toko (Permanen)

+62 812-9294-0919

SiPinter - DPMPTSP Kota Cimahi

BERDASARKAN
1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ;
2. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/ PRT/M/2016 TENTANG IZIN

Kirim pesan

+62 812-9294-09...

2. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/ PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG;
3. PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI WILAYAH KOTA CIMAHI;
4. PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bangunan berkonstruksi tersebut harus ber – IMB. Untuk membuat Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMB) ada beberapa tahapan: 1) Permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) pengurusannya di DPMPTSP Kota Cimahi; 2) Permohonan Pengesahan Gambar Konstruksi pengurusannya di DPMPTSP Kota Cimahi; 3) permohonan Izin Mendirikan

Kirim pesan

+62 812-9294-09...

di DPMPTSP Kota Cimahi; 3) permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pengurusannya di DPMPTSP Kota Cimahi. Semua persyaratan dan formulir untuk setiap tahapan yang di lakukan di DPMPTSP Kota Cimahi dapat di unduh di website. https://dpmptsp.cimahikota.go.id/member/login Catatan: Untuk informasi lebih lanjut silahkan datang ke DPMPTSP Kota Cimahi, Gedung C lantai 1. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

+62 812-9294-0919

SiPinter - DPMPTSP Kota Cimahi

Semua persyaratan dan formulir untuk setiap tahapan yang di lakukan di DPMPTSP Kota Cimahi dapat di unduh di website.

Kirim pesan

+62 812-9294-09...

https://dpmptsp.cimahikota.go.id/member/login

Silahkan coba akses link diatas 👆

Untuk dapat melakukan permohonan perizinan melalui SiPinter pemohon terlebih dahulu wajib memiliki akun. Jika belum memiliki akun silahkan klik tombol daftar sekarang

Dikarenakan ada pembaharuan sistem Jika pemohon sudah memiliki akun, silahkan lakukan registrasi ulang dengan cara meriset password dengan memilih tombol "lupa password" ikuti langkah selanjutnya sesuai arahan

Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

+62 812-9294-0919

Silahkan buat akun dulu

Kirim pesan

+62 812-9294-09...

+62 812-9294-0919

Silahkan buat akun dulu



Baik, terimakasih info nya pak/bu 🙏

Kirim pesan

+62 896-6827-21

Selamat siang bapak/ibu

Saya mau menanyakan untuk registrasi akun. Tadi saya sudah mendaftar atas nama dodo kusnadi. Tapi saya melampirkan email nya tidak cocok dengan email yg saya punya. Dan mau mendaftar ulang sudah tidak bisa, karna nik ktp nya yg sama. Mohon dibantu. Terimakasih

19 Januari 2021

Selamat sore

20 Januari 2021

Selamat pagi

Boleh fotokan KTP pemohon

dan email yg digunankan (penulisan benar)

serta yang saat di daftarkan

Kirim pesan

+62 896-6827-21

Baik pak sebentar



Email yg benar (dodo kusnadi 66@gmail.com)

Email pada saat di daftarkan (dodo kusnadi 66@gmail)

Baik Terima akan kami follow up ke bagian IT

Baik. Terimakasih atas informasi dan bantuannya

+62 896-6827-2142

Kirim pesan

+62 896-6827-21

20 Januari 2021

Silahkan lakukan reset password



Pesan ini telah dihapus

Baik. Terimakasih pak

Kirim pesan

Fahmi

Selamat Siang. Berkas telah kami periksa namun terdapat beberapa hal yang harus dilengkapi yakni:
1. Fotokopi KTP pemohon;
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan/perusahaan;
3. Surat Kuasa dan fotokopi KTP kuasa apabila pengurusan permohonan izin tidak dilakukan oleh pemohon sendiri;
4. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame (Screenshoot Google Maps)
Guna proses lebih lanjut Mohon lakukan pengajuan kembali dengan seluruh persyaratan yang telah dilengkapi. Terima Kasih.

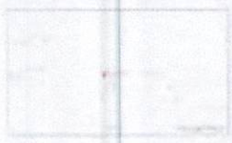
Baik Pak, Terima kasih atas informasinya,... segera akan kami lengkapi... dan diajukan lagi

Kirim pesan

Fahmi

Baik Pak, Terima kasih atas informasinya,... segera akan kami lengkapi... dan diajukan lagi







Contoh

Kirim pesan

Fahmi

Contoh Point 5 & 6 Pada Persyaratan
5. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame
6. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R

boleh sy telp pak.... biar sy jelas

Layanan ini hanya chat

baik tks

19 Januari 2021

Selamat siang bpk/ibu,... Sy sdh upload kembali,.. pengajuan permohonan penjinan tpr non permanen an.fahmi,... Apakah masih proses ...?

Tks

Kirim pesan

Fahmi

Tks

20 Januari 2021

Selamat Siang. Berkas telah kami periksa namun terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki yakni:
1. Pemohon / penerbang izin adalah SUHENDAR
2. Sesuai dengan Surat Kuasa antara SUHENDAR dengan M FAHMI hanya mengurus dan menunggah dokumen izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen, maka dari itu mohon untuk memperbaiki kolom tertulis dan formulir surat penyataan.
Pasal 23 Ayat (2) Point (a) SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Guna proses lebih lanjut Mohon lakukan pengajuan kembali dengan

Kirim pesan

Fahmi

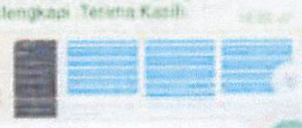
20 Januari 2021

Selamat Siang. Berkas telah kami periksa namun terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki yakni:
1. Pemohon / penerbang izin adalah SUHENDAR
2. Sesuai dengan Surat Kuasa antara SUHENDAR dengan M FAHMI hanya mengurus dan menunggah dokumen izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen, maka dari itu mohon untuk memperbaiki kolom tertulis dan formulir surat penyataan.
Pasal 23 Ayat (2) Point (a) SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Guna proses lebih lanjut Mohon lakukan pengajuan kembali dengan seluruh persyaratan yang telah dilengkapi. Terima Kasih.

Kirim pesan

Yogi Irawan

Selamat sore, Pemohon Izin Penyelenggaraan Reklame atas nama Yogi Irawan untuk dan atas nama PT. Prima Usaha Era Mandiri berkas telah kami periksa namun terdapat beberapa hal yang masih harus dipertahankan yaitu sebagai berikut:
1. Terdapat ketidak sesuaian lokasi Pada A.III Nomor 13/2016 dengan lokasi Izin Penyelenggaraan Reklame Dapat menggunakan Surat pernyataan tidak kebetatan reklame (bisa di unduh pada Download Formulir – Bidang Pembangunan – Formulir Pendukung – Surat Pernyataan Tidak Kebetatan Reklame)
Guna proses lebih lanjut Mohon lakukan pengajuan kembali dengan seluruh persyaratan yang telah dilengkapi. Terima Kasih.



Kirim pesan

Yogi trawan

Pada A...II Nomor 13/2016 dengan lokasi Izin Penyelenggaraan Reklame Dapat menggunakan Surat pernyataan tidak keberatan reklame (bisa di Unduh pada Dowotloed) Formulir – Bidang Pembangunan – Formulir Pendukung – Surat Pernyataan Tidak Keberatan Reklame) Guna proses lebih lanjut Mohon lakukan pengajuan kembali dengan seluruh persyaratan yang telah dilengkapi. Terima Kasih

Baik pa Terima kasih.. Kami akan lengkapi lagi persyaratan yg kurang nya... Sekali lagi terimakasih

Terima kasih kembali

Kirim pesan

awan sppl dibalikin

Selamat pagi, kami dari DPMPTSP mau memberi informasi untuk permohonan Rek Lingkungan atas nama Ir. H. Awan Hermawan dikembalikan kepada pemohon karena yang dikuasakan tidak melanjutkan permohonan dan tidak ada nomor kontak yang dapat dihubungi. Terimakasih

Kirim pesan

karna puji

Selamat pagi, kami dari DPMPTSP mau memberi informasi untuk permohonan Rek Lingkungan atas nama Karna Puji (PT. SINAR DAKRA LAKSANA) menurut Nota Dinas dari Dinas Lingkungan Hidup akan dikembalikan kepada pemohon karena Pemohon masih ada perencanaan yang belum pasti sehingga lahan dan bangunan yang diajukan masih belum jelas. Terimakasih

Kirim pesan

+62 812-2374-04...

Mau nanya klo SPPL bisa dilayani off line ke pemkot pagi jam 9

Selamat pagi

SPinter - DPMPTSP Kota Cimahi

Semua persyaratan dan formulir untuk setiap tahapan yang di lakukan di DPMPTSP kota Cimahi dapat di unduh pada website

https://dpmptsp.cimahikota.go.id/member/login

Silahkan coba akses link diatas ?? Jika belum memiliki akun silahkan klik tombol daftar sekarang

Dikarenakan ada pembaharuan sistem Jika pemohon sudah memiliki

Kirim pesan

+62 812-2374-04...

Dikarenakan ada pembaharuan sistem Jika pemohon sudah memiliki akun sebelum tgl 23 Maret 2020 silahkan lakukan registrasi ulang dengan cara merest password dengan memilih tombol "lupa password" dan langkah selanjutnya sesuai arahan

Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih

LOG IN
Pilih - Download Formulir
Pilih - Formulir Bidang Pembangunan
Pilih - Surat Permohonan Rekomendasi Lingkungan (SPPL)

Lengkapi semua data Form yang di butuhkan sesuai persyaratan Lalu di Scan Kedalam bentuk ekstensi .PDF selanjutnya di gabungkan menjadi dalam satu Folder dan di ekstrak ke dalam format .ZIP

Kirim pesan

+62 812-2374-04...

Setelah semua data siap
- Pilih Permohonan Izin
- Ajukan Permohonan Izin
- Bidang Perizinan - Bidang Perizinan Pembangunan
- Pilih Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup
- Isi semua data sesuai data
- Selanjutnya
- Upload File formulir dan File persyaratan
- Unggah
- Selanjutnya
- Ajukan Permohonan Izin

Kirim pesan

+62 812-2374-04...

Masuk dan daftar sipinter nya susah... bisa dipandu di kantor

SPinter - DPMPTSP Kota Cimahi

https://dpmptsp.cimahikota.go.id/member/login

42 KB

Kirim pesan

+62 812-2374-04...

Kirim pesan

+62 812-2374-04...

Sudah punya akun?

Belum

https://dpmptsp.cimahikota.go.id/member/register

Silahkan klik link tersebut untuk daftar membuatakun dibutuhkan KTP Email aktif dan no Hp untuk verifikasi

Cara pendaftaran

Klo capcha di isi jumlah nya atau yg tertera

Kirim pesan

+62 812-2374-04...

Cara pengisian

di isi jumlah

contoh 12 + 5

Ok

Klo password berapa huruf karakter

Minimal 8 digit

Bebas, yg gampang diingat

Ok sy coba

Siap

Kirim pesan

+62 812-2374-04...

Susah gak masuk'

Ada pemandu nya di kantor dpmptsp nya ?

Kesalahannya dimana?

atas nama siapa?

Kirim pesan

+62 812-2374-04...

atas nama siapa?

daftarnya?

Sudah mencoba daftar ulang akun?

Atas nama dadan ramdhan

Boleh fotokan KTP nya

untuk kami cek ke bagian IT

Dan alamat email yg di daftarkan

Kirim pesan

+62 812-2374-04...

Email nya

Teu masuk" login nya

Kirim pesan

+62 812-2374-04...

Teu masuk" lo

Kirim pesan

+62 812-2374-04...

12 Januari 2021

404

klik link ini

yang terbaru

bapak harus aktivasi terlebih dahulu

sebelum login

cek email terbaru dari dpmptsp kota cimahi

Kirim pesan

+62 812-2374-04...

link verifikasi yg terbaru klik

yang paling bawah

lihat jam nya

link tersebut berlaku 1 jam

Kirim pesan

+62 812-2374-04...

Tutup verifikasi

cek email

Semua di klik bim masuk

Kirim pesan

+62 812-2374-04...

404 terus

cek email terbaru dari dpmptsp

sudah kami kirim ulang

Kirim pesan

Lampiran Surat Keterangan
No. : 503/ 082 /I/DPMPTSP/2022
Tanggal: 14 Januari 2022

DAFTAR KEGIATAN SEMINAR / BISNIS MEETING YANG DIHADIRI
TAHUN 2021

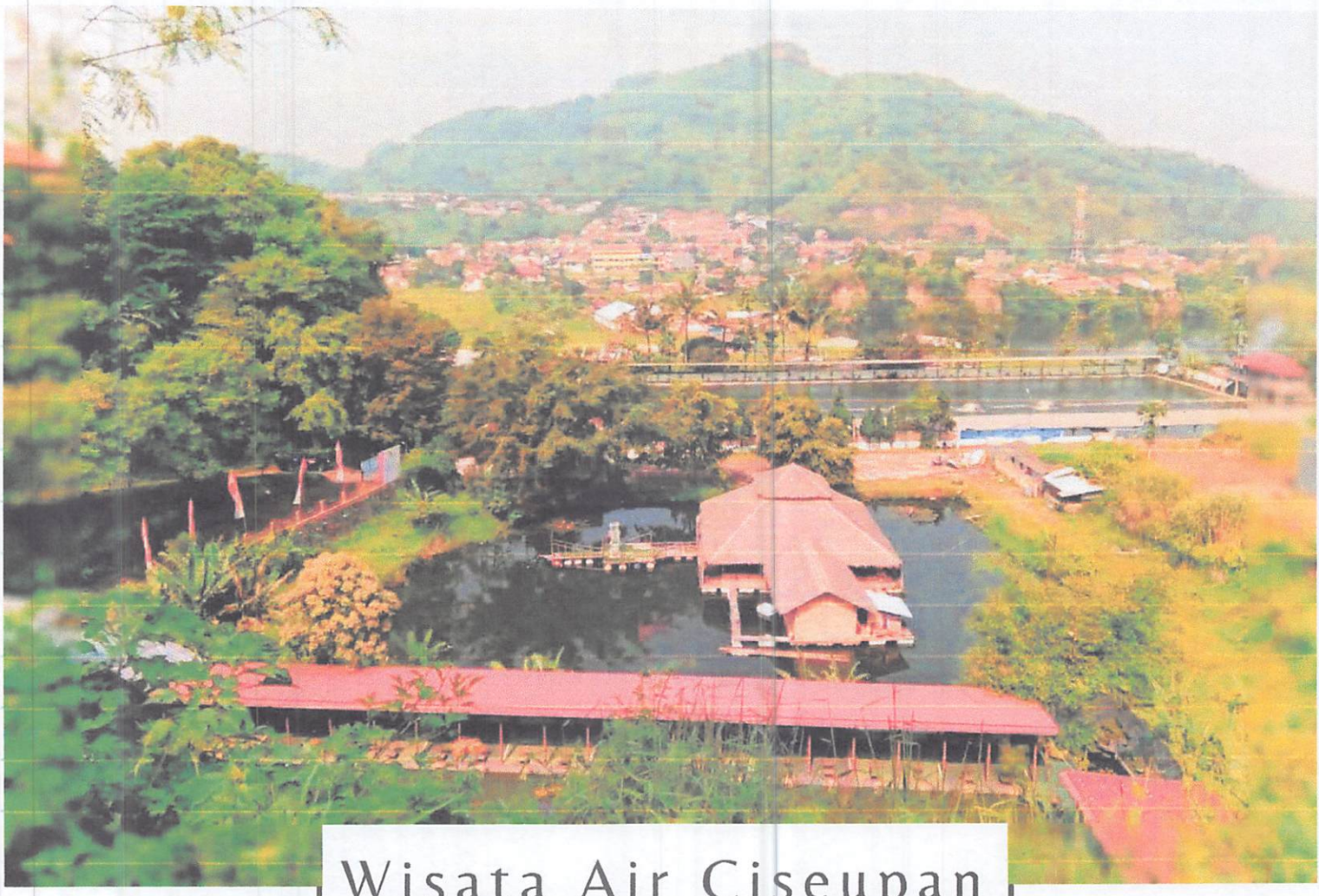
No.	Hari/Tanggal	Nama Kegiatan	Dokumentasi
1	Kamis, 5 Agustus 2021	Ekspose PT. Effort Digital Multi Solution dalam pembuatan aplikasi pendukung MPP Kota Cimahi	
			
2	Jumat, 27 Agustus 2021	Ekspose company profile Perusahaan PT Aegis Ultima Tech yg bergerak di pengembangan website dan Multimedia interaktif	
3	Jumat, 24 September 2021	Rapat Ekspose Smartfren untuk Produk Zoom.	
4	Kamis, 30 September 2021	Pre Award Meeting Kontrak dengan PT. Mellindo Total Berkarya	

5	Kamis, 18 November 2021	Menerima Kunjungan Rencana Kerja dan Diskusi Pemetaan Energi PT.PGN	
			

Cimahi, N Januari 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DPMPTSP

Dra. HELLA HAERANI
NIP.196602141992022001



Wisata Air Ciseupan

Kawasan Wisata Ciseupan sebelumnya merupakan area penambangan pasir, yang hingga kini meninggalkan bekas berupa danau atau situ, di kawasan tersebut terdapat mata air yang dimanfaatkan penduduk untuk air minum.

Situ Ciseupan berada di Kampung Ciseupan RW 07 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan. Luas kawasan Ciseupan kira-kira 15 ha, termasuk didalamnya areal permukiman eksisting. Status lahan milik masyarakat dengan legalitas kepemilikan berbentuk Akta Jual Beli, batas kawasan tersebut adalah jalan kolektor yang mengelilinginya, sebelah utara adalah jalan komplek perumahan Pancanaka Hill, sebelah timur Jalan Ibu Garnasih, sebelah selatan Jalan Ciseupan dan sebelah barat Jalan Kerkof. Luas area Situ Ciseupan adalah 4.5 ha.

Gambar 1
Posisi Geografis Kawasan Wisata Ciseupan





6°53'37.9"S 107°30'56.0"E

1. Batas Utara
   Perumahan Pancaka Hill
2. Batas Timur
   Jl. Ibu Ganirah
3. Batas Selatan
   Jl. Ciseupan
4. Batas Barat
   Jl. Cangkorah

Kawasan Wisata Ciseupan sebelumnya merupakan area penambangan pasir, yang hingga kini meninggalkan bekas berupa danau atau situ, di kawasan tersebut terdapat mata air yang dimanfaatkan penduduk untuk air minum.

Gambar 2
Potensi Kawasan Wisata Ciseupan



Konsep zoning kawasan wisata ciseupan

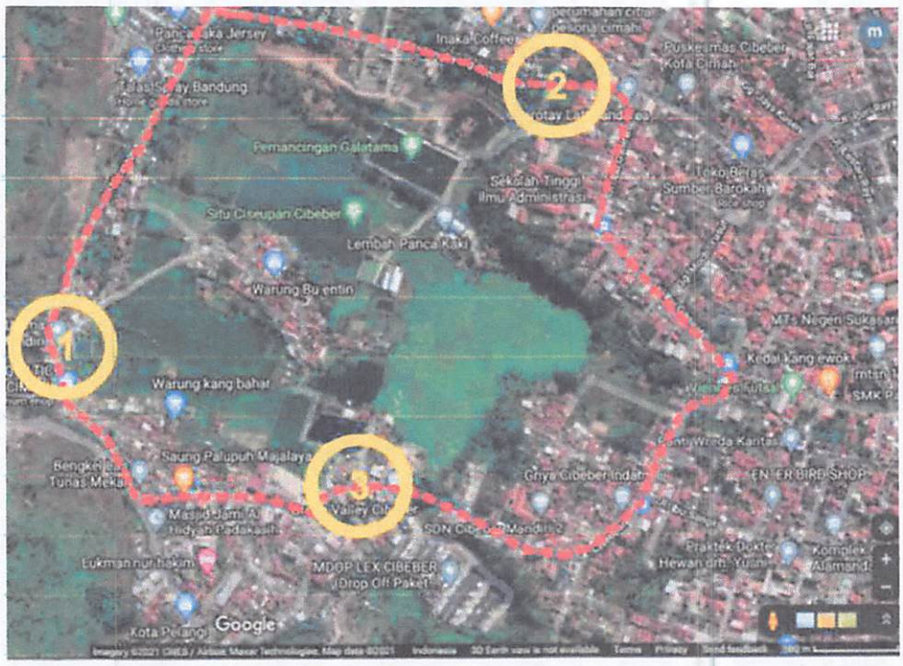
Akses masuk

Legenda

1. Semak belukar dan danau berpotensi untuk wisata bernuansa hutan kota sebagai penyeimbang ekosistem di kawasan ini potensi budi daya perikanan.
2. Kolam Pancing berpotensi untuk ditingkatkan sarana dan prasarana.
3. Sawah berpotensi untuk dikembangkan sarana dan prasarana wisata air, misalanya ; Floating Market, Perdagangan Lokal, Restoran Terapung, Taman Tematik, Plaza, dsb. Potensi peternakan Kambing.
4. Zona pendukung utilitas kawasan seperti TPS dan buffer zone (RTH).
5. Kolam berenang exsisting berpotensi dikembangkan menjadi waterpark.
6. Sawah direkomendasikan tetap karena diapit oleh kawasan permukiman, hal ini cenderung menyatu.
7. Permukiman exsisting.

Kelebihan lainnya adalah dekat dengan tempat wisata lainnya yaitu kampung adat Cireundeu, bukit/gunung Bohong dan jalur kereta api cepat. Kawasan Danau Ciseupan dihubungkan melalui jalan Cibeber, kondisi jalan cukup baik dan beberapa jalan alternatif melalui kampung Ciseupan, tetapi hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua. Sarana jalan utama dapat diakses melalui jalan Cangkorah, Jalan Ibu Ganirah dan Ciseupan.

Gambar 3
Orientasi masuk Kawasan Wisata Ciseupan





1 Jl. Cangkorah

2 Jl. Ibu Ganirah

3 Jl. Ciseupan

Kawasan inipun memiliki kelebihan karena terkoneksi dengan rest area KM 125 Baros sehingga pengunjung dari arah Jakarta dapat lebih mudah berkunjung ke area Wisata Ciseupan.

Masyarakat disekitar kawasan pariwisata Ciseupan sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik, pedagang, buruh pembuatan batako, wirausaha dan pegawai swasta.

Didaerah kawasan Pariwisata Ciseupan terdapat berbagai produk home industry local, seperti keripik pisang, kerajinan bunga plastik, kerupuk rangginang, manisan terong ungu dan sale pisang, kaligrafi, lampion, tempe kering dan jamur olahan.

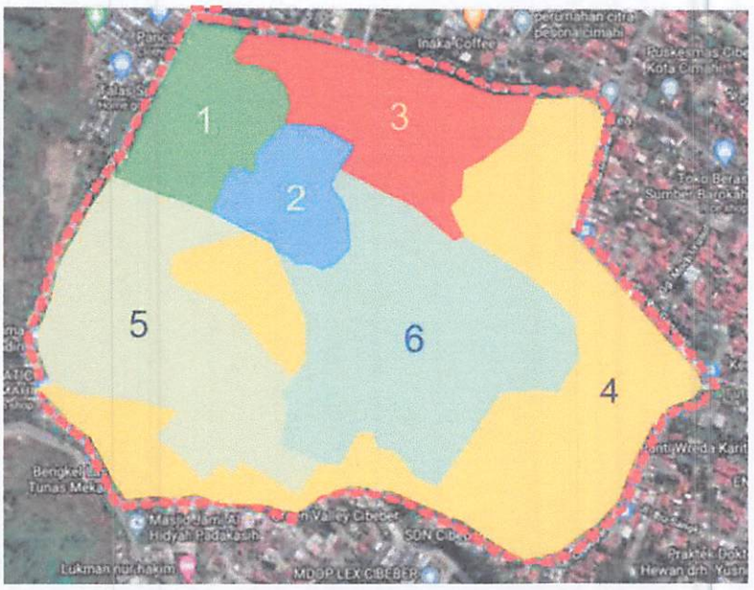
Bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah Kota Cimahi dapat diberdayakan seni pertunjukan dan pengembangan homestay sehingga kawasan dapat semakin berkembang.

Membangun kawasan wisata Ciseupan Cibeber dengan menghadirkan citra kawasan, yaitu wisata alam yang atraktif, modern, dan berwawasan lingkungan.

Atraksi wisata yang dapat dikembangkan di kawasan Ciseupan adalah wisata alam/air, pemanfaatan danau eksisting, agrowisata, kampung wisata, wisata edukatif, dan wisata hiburan/permainan.

Rencana zoning kawasan yang termasuk dalam ruang lingkup perencanaaan kawasan wisata ciseupan terdiri dari dua alternative, yang didasarkan pada pemetaan potensi kawasan dan potensi pengembangan atraksi wisata dengan mengkaitkan pada empat kriteria, yaitu keamanan pengunjung, kemudahan kontruksi, peluang pasar dan daya tarik wisata.

Gambar 4
Rencana zona Kawasan Wisata Ciseupan



1 Zona Hutan Kota

2 Zona Danau

3 Zona Kolam Pancing & Restoran

4 Zona Kampung Wisata

5 Zona Argowisata

6 Zona Wisata Air

Terdapat 6 zona dengan 16 atraksi yang dapat dikembangkan di kawasan Situ Ciseupan diantaranya :

Tabel 1
Alternatif 1
16 Zona Pengembangan Pariwisata Ciseupan

NO	Jenis Atraksi / Kegiatan
1	**Zona Hutan Kota**
	Area Hutan Kota Air Softgun Field
2	**Zona Danau**
	Panorama Danau Ex Tambang Joging Track Jetsky
3	**Zona Kolam Pemancingan**
	Restoran Kolam Pancing
4	**Zona Wisata Air**
	FIloating Market Watter Boom Area Foto Bawah Air Bertema Militer Kolam Renang
5	**Zona Argowisata**
	Pertanian Pangan (Wisata Tanam dan Panen) Peternakan (pengembangan Kambing Etawa)
6	**Zona Kampung Wisata**
	Kuliner Atraksi Budaya Homestay

Tabel 2
Alternatif 2
12 Zona Pengembangan Pariwisata Ciseupan

NO	Jenis Atraksi / Kegiatan
1	**Zona Hutan Kota**
	Area Hutan Kota Air Softgun Field
2	**Zona Danau**
	Panorama Danau Ex Tambang Joging Track
3	**Zona Kolam Pemancingan**
	Restoran Kolam Pancing
4	**Zona Wisata Air**
	Water Boom Kolam Renang
5	**Zona Argowisata**
	Pertanian Pangan (Wisata Tanam dan Panen)
6	**Zona Kampung Wisata**
	Kuliner Atraksi Budaya Homestay



Untuk mendorong terwujudnya pengembangan kawasan wisata air Situ Ciseupan perlu difasilitasi upaya mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya baik teknis, administrasi dan pembiayaannya, maka dibutuhkan potret bisnis melalui kajian pra feasibility study, sebagai tahap awal rencana pengembangan, sebagai uapaya meningkatkan daya saing dan minat investasi.

Jika memungkinkan dibuatkan Place Branding (Merk Tempat) untuk Branding dan juga Sign yang bisa dilihat pengunjung atau pelintas kereta api cepat bahkan tetap terlihat pada saat malam hari. Pengembangan Ciseupan dapat diintegrasikan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan Cimahi Selatan dan Kelurahan Cibeber termasuk SOPD terkait untuk bisa mengembangan produk unggulan setempat.

Semkin banyak aktifitas wisata yang berkembang di kawasan maka akan meningkatkan percepatan waktu pengembalian nilai investasi. Penganekaragaman aktifitas wisata bukan hanya tugas investor tetapi juga pemerintah daerah termasuk kecamatan, kelurahan dan komunitas di wilayah sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal dan tugas pemerintah menyiapkan tenaga kerja lokal yang dapat diserap oleh industri yang adan dikembangkan.

Kajian FS menunjukan bahwa kegiatan utama yang dapat dilakukan oleh investor diantaranya water sport, kuliner di atas danau, pertunjukan diatas situ dengan melakukan pendangkalan terlebih dahulu, pengembangan jalur tracking sekitar danau dan water boom. Dengan aktifitas utama ini diperkirakan investasi akan kembali dalam waktu 7 tahun. Tetapi jika juga dilakukan aktifitas pendukung lainnya seperti seni pertunjukan, dintergrasikan dengan kawasan lainnya, homestay maka investasi bisa kembali dalam waktu 5 tahun.

Pemberdayaan masayakat harus juga dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Kelurahan setempat bersama komunitas. Termasuk juga pengembagan hutan kota Bukit Padakasih, area camping Gunung Bohong, pengembangan kesenian setempat, pengaturan tata guna lahan dan ruang, dan penyiapan tenaga kerja.

Link video Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=bl2wv5eCQWw



Lampiran Surat Keterangan
No. : 503/ 080 /I/DPMPTSP/2022
Tanggal: 14 Januari 2022

REKAPITULASI REALISASI INVESTASI KOTA CIMAHI
TAHUN 2012 - 2021

TAHUN	INVESTASI (Rp)	KENAIKAN PERTAHUN (Rp)	%
2012	2,065,640,182,996.00	630,748,600,232.00	43.96
2013	3,027,923,628,344.00	962,283,445,348.00	46.59
2014	3,543,835,320,764.00	515,911,692,420.00	17.04
2015	3,910,652,102,380.00	366,816,781,616.00	10.35
2016	7,213,569,420,186.55	3,302,917,317,806.55	84.46
2017	8,953,319,609,542.47	1,739,750,189,355.92	24.12
2018	8,862,257,906,470.47	(91,061,703,072.00)	(1.02)
2019	24,410,560,302,066.00	15,457,240,692,523.50	172.64
2020	5,685,630,739,622.00	(18,724,929,562,444.00)	(76.71)
2021	4,720,796,554,068.00	(964,834,185,554.00)	(16.97)

Cimahi, 14 Januari 2022

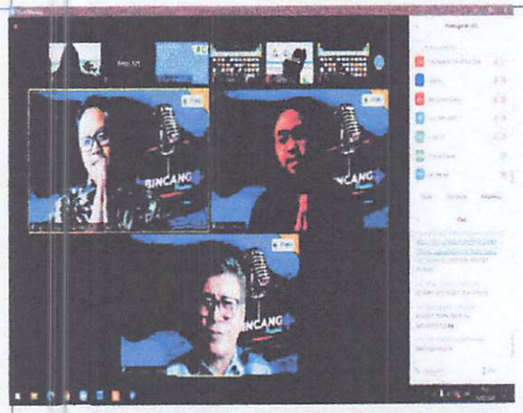
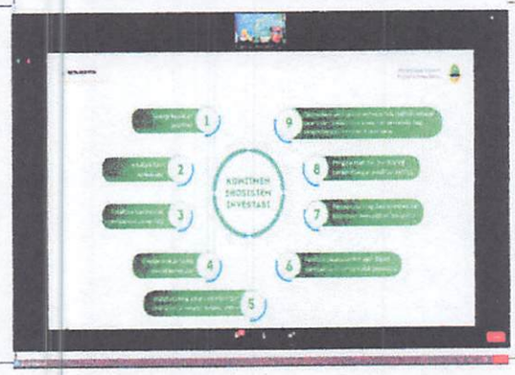
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI,

Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 199202 2 001

Lampiran Surat Keterangan
No. : 503/ 084 /I/DPMPTSP/2022
Tanggal: 14 Januari 2022

DAFTAR KEGIATAN SEMINAR / BISNIS MEETING YANG DIHADIRI
TAHUN 2021

No.	Hari/Tanggal	Nama Kegiatan	Dokumentasi
1	Selasa, 6 April 2021	Forum Fasilitasi Pemulihan Ekonomi Bidang Investasi dan Pembiayaan Keuangan Kota Cimahi	
2	Jumat, 9 April 2021	Rapat Konsolidasi Pemantauan Penanaman Modal oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat	
3	Jumat, 9 April 2021	Forum Group Discussion Penyusunan Rencana Aksi Pemulihan Ekonomi Kota Cimahi	
4	Selasa, 13 April 2021	FGD Business Intelligent Prov Jabar	

5	Senin, 3 Mei 2021	Dialog nasional pemulihan ekonomi dan investasi daerah	
6	Jumat, 16 Juli 2021	Virtual Podcast DPMPTSP Jawa Barat bersama KREASI Jabar dan AFPI dengan tema "Peluang Investasi melalui Peer to Peer Lending"	
			
7	Kamis, 19 Agustus 2021	Launching Ekosistem Investasi	
			

8	Kamis, 19 Agustus 2021	Cinematography of Investment Festival. Kompetisi Video dan Photo Essay adalah upaya penggalian peluang investasi di sektor UMKM Jawa Barat.	 
9	Kamis, 16 September 2021	Zoom Webinar Winning in The Recovery Era, 5 Jurus memenangkan persaingan pasar.	 
10	Kamis, 16 September 2021	InSight Webinar Investment Opportunities in West Java	 

Cimahi, 14 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DPMPTSP

Dra. HELLA HAERANI

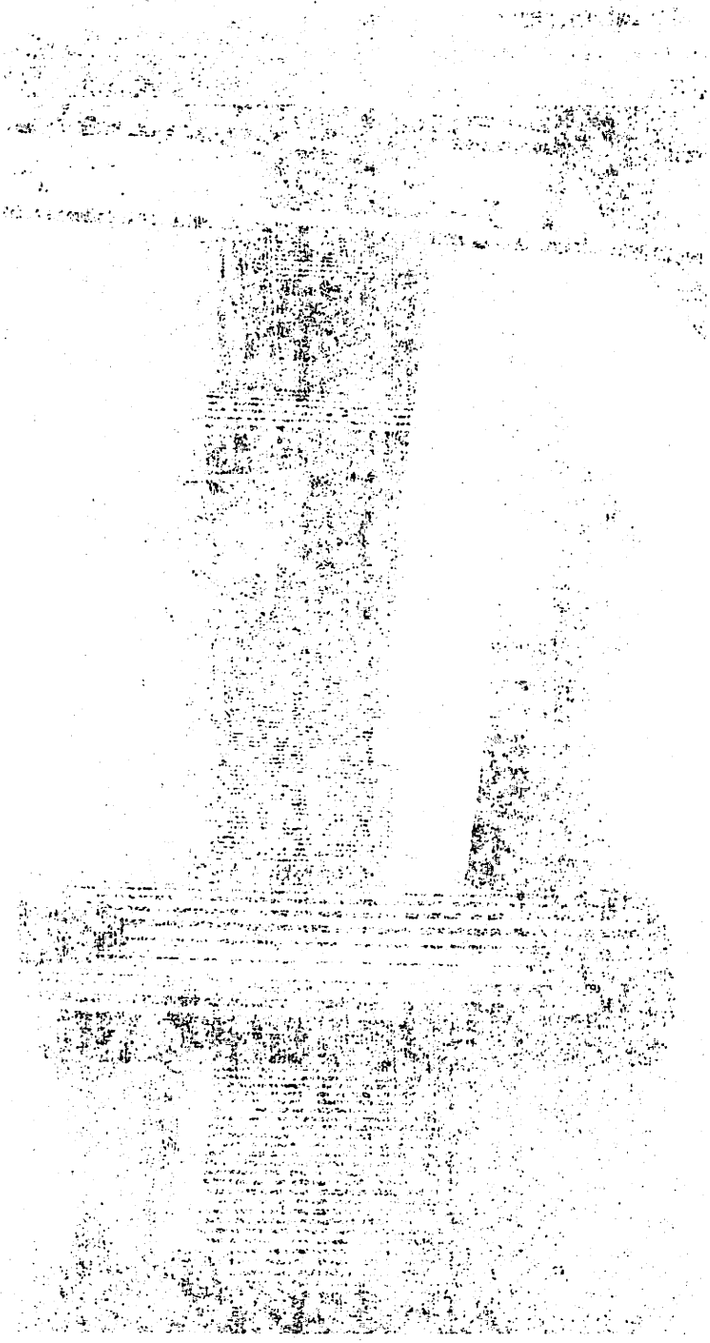
NIP.196602141992022001

Dokumentasi Progres Pekerjaan Interior
























VISITOR

